Nomor : 4601001.34

STATISTIK POLITIK DAN KEAMANAN

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

2018

https://yogyakarta.bps.go.id

BADAN PUSAT STATISTIK
PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

STATISTIK POLITIK DAN KEAMANAN

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

2018

https://jogyakarta.bps.go.id

STATISTIK POLITIK DAN KEAMANAN
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA 2018

ISSN : 2460-3139

Nomor Publikasi : 34520.1907

Nomor Katalog : 4601001.34

Ukuran Buku : 21,0 x 29,7 cm

Jumlah Halaman : xiv + 66

Naskah:

Bidang Statistik Sosial BPS Provinsi D.I. Yogyakarta

Desain Sampul:

Bidang Statistik Sosial BPS Provinsi D.I. Yogyakarta

Penyunting:

Bidang Statistik Sosial BPS Provinsi D.I. Yogyakarta

Diterbitkan oleh:

©Badan Pusat Statistik Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

Dicetak oleh :
CV. Magna Raharja Tama (MAHATA) Yogyakarta

Dilarang mengumumkan, mendistribusikan, mengkomunikasikan, dan/ atau menggandakan sebagian atau seluruh isi buku ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari Badan Pusat Statistik Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

https://yogyakarta.bps.go.id

TIM PENYUSUN BUKU

STATISTIK POLITIK DAN KEAMANAN

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA 2018

https://yogyakarta.bps.go.id

Penanggung Jawab	: Heru Margono
Editor	: Soman Wisnu Darma
	Jafar Nawawi
Naskah	: Agung Wibowo
Pengolah Data	: Agung Wibowo

https://yogyakarta.bps.go.id

KATA PENGANTAR

Publikasi Statistik Politik dan Keamanan Daerah Istimewa Yogyakarta 2018 menyajikan informasi kondisi politik dan keamanan di Daerah Istimewa Yogyakarta. Dinamika kriminalitas yang terjadi mencerminkan potensi keamanan yang dimiliki baik dari segi kekuatan maupun intensitas tindak kejahatannya. Sementara itu demokrasi yang terjadi dapat memberikan deteksi dini kondisi politik suatu wilayah.

Sumber data yang digunakan dalam penyusunan publikasi ini berasal dari data primer dan data sekunder. Data primer antara lain diperoleh dari pendataan Potensi Desa maupun Indeks Demokrasi Indonesia. Adapun data sekunder yang digunakan merupakan hasil kompilasi dari beberapa instansi, antara lain dari Kepolisian, Kanwil Hukum dan HAM, Kejaksaan, Kehakiman, Komisi Pemilihan Umum (KPU), dan Sekretariat DPRD di Daerah Istimewa Yogyakarta.

Semua pihak yang telah membantu proses penyusunan publikasi ini disampaikan terima kasih. Saran dan masukan untuk perbaikan publikasi ini sangat diharapkan untuk penyempurnaan publikasi yang akan datang. Semoga statistik yang disajikan dalam publikasi ini dapat memberikan manfaat bagi para pengguna data.

https://yogyakarta.bps.go.id

Yogyakarta, November 2019

Kepala Badan Pusat Statistik
Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

Dr. Heru Margono, M.Sc

https://yogyakarta.bps.go.id

ABSTRAKSI

Tahun 2018 merupakan tahun krusial bagi dunia politik di Indonesia. Pada tahun tersebut, seluruh komponen politik di tanah air menjadikannya sebagai titik awal persiapan perhelatan politik yang akan digelar di tahun 2019. Berbagai persiapan besar seperti penetapan calon presiden, penggalangan mitra koalisi, dan juga penetapan calon anggota legislatif dilakukan di tahun 2018. Terlebih lagi, pesta demokrasi pada tahun 2019 menggabungkan pemilihan presiden dan pemilihan legislatif pada saat yang bersamaan. Dengan demikian, situasi politik pada tahun 2018 berada dalam suhu yang tinggi dan penuh dengan dinamika.

Pamor D.I. Yogyakarta sebagai pewaris kerajaan besar Mataram dan peran sejarah yang sangat penting dalam perjalanan kehidupan kebangsaan Indonesia, menjadikan wilayah ini sangat diperhitungkan dalam percaturan politik nasional. Pemimpin D.I. Yogyakarta dengan kharisma yang sangat kuat, menjadikannya sebagai salah satu tokoh yang disegani dalam kancah politik Indonesia. Kombinasi hal tersebut menjadikan D.I. Yogyakarta sebagai salah satu barometer politik nasional.

Dalam rangka menjaga stabilitas keamanan wilayah, D.I. Yogyakarta didukung dengan kelengkapan prasarana keamanan, antara lain 1 polda, 5 polres/polresta, 80 polsek/polsekta dan 46 pos polisi yang tersebar di seluruh wilayah kabupaten/kota. Jumlah polisi yang bertugas di wilayah D.I. Yogyakarta pada tahun 2018 sebanyak 9.874 personil. Jumlah personil polisi tahun 2018 dibanding dengan tahun 2017 menunjukkan adanya penurunan. Adapun menurut jenis kelamin, mayoritas polisi di D.I. Yogyakarta adalah laki-laki sebanyak 90,37 persen. Sementara jumlah polisi wanita sebanyak 9,73 persen. Tingginya jumlah polisi laki-laki dibandingkan polisi wanita diduga terkait dengan perekrutan polisi yang disesuaikan dengan kebutuhan di lapangan.

Turunnya jumlah personil polisi dan pertambahan jumlah penduduk di D.I. Yogyakarta mengakibatkan rasio penduduk per polisi semakin meningkat. Hal ini mengakibatkan rata-rata beban tugas polisi dalam memberikan pelayanan terhadap masyarakat semakin meningkat. Selain itu, meningkatnya rasio penduduk per polisi juga mempunyai potensi pada berkurangnya efektivitas pelayanan kepolisian kepada masyarakat. Kondisi tersebut harus dapat diantisipasi agar tidak berpengaruh pada besarnya pengaduan masyarakat yang tidak tertangani dengan baik, penyidikan berlarut-larut, atau keterlambatan polisi di tempat kejadian perkara.

https://jogyakarta.bps.go.id

Kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat dapat dilihat dari selang waktu kejahatan (*crime clock*). Selang waktu kejahatan adalah selang waktu atau interval waktu terjadinya satu tindak kejahatan dengan kejahatan yang lain. Semakin tinggi nilainya menunjukkan bahwa kondisi keamanan dan ketertiban di suatu wilayah semakin membaik. Selang waktu terjadinya tindak kejahatan di D.I. Yogyakarta tersaji dalam Gambar 3.2. Pada tahun 2018, selang waktu tindak kejahatan (*crime clock*) di D.I. Yogyakarta adalah 1 jam 38 menit 51 detik, artinya setiap 1 jam 38 menit 51 detik di D.I. Yogyakarta terjadi 1 kasus tindak kejahatan baru. Kondisi ini lebih lambat dibandingkan dengan tahun 2016 yaitu 1 jam 17 menit 24 detik. Hal ini menunjukkan bahwa tindak kejahatan di D.I. Yogyakarta semakin berkurang. Dengan kata lain bahwa kondisi keamanan dan ketertiban di D.I Yogyakarta semakin membaik.

Hasil pemilu pada tahun 2014 di D.I. Yogyakarta untuk DPRD Provinsi, hanya terdapat sembilan partai yang berhasil meloloskan perwakilannya di lembaga ini. Kesembilan partai tersebut berdasarkan urutan perolehan suara di DPRD Provinsi adalah PDIP (14 anggota), PAN (8 anggota), Partai Golkar (8 anggota), Partai Gerindra (7 anggota), PKS (6 anggota), PKB (5 anggota), Partai Nasdem (3 anggota), Partai Demokrat (2 anggota) dan PPP (2 anggota).

Berdasarkan komposisi jenis kelaminnya, anggota DPRD Provinsi D.I. Yogyakarta didominasi oleh laki-laki. Pada tahun 2018, jumlah anggota DPRD Provinsi yang berjenis kelamin laki-laki sebanyak 48 orang (87,27 persen). Sementara anggota perempuan di DPRD tingkat provinsi sebanyak 14,55 persen. Persentase perempuan di lembaga legislatif ini mengalami kenaikan dibandingkan dengan tahun sebelumnya karena adanya pergantian antar waktu untuk PAN. Meskipun demikina, keterlibatan perempuan di lembaga perwakilan rakyat tersebut masih relatif rendah. Rendahnya keterwakilan perempuan di badan legislatif dapat berimplikasi pada terabaikannya isu-isu perempuan dan kebijakan yang bias gender di wilayah ini.

Pada tahun 2018, dalam skala dalam skala 0 sampai dengan 100, nilai IDI untuk D.I. Yogyakarta adalah 80,82. Jika dibandingkan dengan tahun 2017 dimana IDI D.I. Yogyakarta tercatat sebesar 83,61 kondisi tersebut menunjukkan adanya penurunan sebesar 2,79 poin. Meskipun tingkat perkembangan IDI D.I. Yogyakarta masih berada dalam kategori “baik” namun perlu mendapat perhatian serius karena telah berada di ambang batas bawah kriteria “baik” tersebut.

https://jogjakota.bps.go.id

DAFTAR ISI

		Halaman
Kata Pengantar		v
Abstraksi		vii
Daftar Isi		ix
Daftar Gambar		x
Daftar Tabel		xi
Bab I	Pendahuluan	
	1.1 Latar Belakang	3
	1.2 Maksud dan Tujuan	5
	1.3 Ruang Lingkup	5
	1.4 Sistematika Penulisan	5
Bab II	Metodologi	
	2.1 Jenis dan Sumber Data	7
	2.2 Konsep dan Definisi	7
	2.3 Penjelasan Teknis	11
Bab III	Gambaran Umum Kriminalitas di D.I. Yogyakarta	
	3.1 Sarana dan Prasarana Keamanan Wilayah	13
	3.2 Perkembangan Tindak Kejahatan di D.I. Yogyakarta	15
	3.3 Jenis-jenis Tindak Kejahatan di D.I. Yogyakarta	17
	3.4 Pelaku Tindak Kejahatan dan Upaya Menjaga Keamanan	20
Bab IV	Gambaran Umum Politik D.I. Yogyakarta	
	4.1 Pemilu Legislatif 2014 dan Pemilu Presiden 2014	23
	4.2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)	24
	4.3. Pemilihan Kepala Daerah	27
	4.4. Perkembangan Demokrasi di Daerah Istimewa Yogyakarta	28
Tabel-tabel		33

https://yogyakarta.bps.go.id

DAFTAR GAMBAR

		Halaman
Gambar 3.1	Rasio Penduduk per Polisi di D.I.Yogyakarta, 2018…..……...	14
Gambar 3.2	Selang Waktu Terjadinya Tindak Kejahatan di D.I. Yogyakarta, 2016-2018 .....…….....….	16
Gambar 3.3	Persentase Desa/kelurahan yang ada Tindak Kejahatan Menurut Jenis Kejahatan di D.I. Yogyakarta Tahun, 2014……...…….	18
Gambar 3.4	Persentase Pelaku Tindak Kejahatan Menurut Kabupaten/kota di Provinsi D.I. Yogyakarta, 2017….....……	20
Gambar 4.1	Persentase Pemilih dalam Pemilu Legislatif 2014 Menurut Hasil Perolehan Suara dan Kabupaten/kota di Provinsi D.I. Yogyakarta...….	23
Gambar 4.2	Jumlah Produk Hukum yang Dihasilkan DPRD Provinsi D.I. Yogyakarta, 2014-2018.....…….	26
Gambar 4.3	Perkembangan IDI Daerah Istimewa Yogyakarta, 2009-2018.....	30
Gambar 4.4	Perkembangan Aspek Indeks Demokrasi Indonesia D.I. Yogyakarta, 2009-2018.....	31

https://yogyakarta.bps.go.id

DAFTAR TABEL

		Halaman
Tabel 1.	Luas Wilayah, Jumlah Kecamatan, Desa/kelurahan, dan Penduduk di Provinsi D.I. Yogyakarta, 2018.....	35
Tabel 2.	Jumlah Kantor Polisi Menurut Kabupaten/kota dan Wilayah Kerja di Provinsi D.I. Yogyakarta, 2018 ….....	36
Tabel 3.	Jumlah Polisi dan Rasio Penduduk per Polisi di Provinsi D.I.Yogyakarta, 2018.....	37
Tabel 4.	Jumlah Desa/kelurahan yang Mempunyai Pos Polisi dan Pos Kamling di Provinsi D.I. Yogyakarta, 2018…….....	38
Tabel 5.	Jumlah Hansip dan Rasio Hansip per Desa/kelurahan Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi D.I. Yogyakarta, 2018 …….....	39
Tabel 6.	Jumlah Tindak Kejahatan yang Dilaporkan *(Crime Total)* Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi D.I. Yogyakarta, 2016-2018.....	40
Tabel 7.	Jumlah Tindak Kejahatan yang Diselesaikan *(Crime Cleared)* Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi D.I. Yogyakarta, 2016-2018.....	41
Tabel 8.	Persentase Penyelesaian Tindak Kejahatan *(Clearance Rate)* Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi D.I. Yogyakarta, 2016-2018.....…….	42
Tabel 9.	Selang Waktu Terjadinya Tindak Kejahatan *(Crime Clock)* Menurut kabupaten/Kota di Provinsi D.I. Yogyakarta, 2016-2018 (detik) …….....	43
Tabel 10.	Resiko Penduduk Terkena Tindak Kejahatan *(Crime Rate)* per 100.000 Penduduk Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi D.I. Yogyakarta, 2016-2018.....	44
Tabel 11.	Banyaknya Desa/kelurahan yang Ada Tindak Kejahatan Menurut Jenis Kejahatan per Kabupaten/kota di Provinsi D.I. Yogyakarta, 2018.....….....…..	45
Tabel 12.	Banyaknya Desa/kelurahan yang Ada Perkelahian Massal Menurut Jenis Perkelahian dan Kabupaten/kota di Provinsi D.I. Yogyakarta, 2018…….....…….	46
Tabel 13.	Jumlah Laporan Tindak Kejahatan Menurut Jenis Kejahatan di Provinsi D.I. Yogyakarta, 2016-2018…….....……....…	47
Tabel 14.	Jumlah Tindak Kejahatan yang Menonjol di Provinsi D.I. Yogyakarta, 2016-2018…….....……....…	48

https://yogyakarta.kpk.go.id

Tabel 15.	Pelaku Tindak Kejahatan Menurut Kabupaten/Kota, Klasifikasi Umur dan Jenis Kelamin di Provinsi D.I. Yogyakarta, 2018……..….....	49
Tabel 16.	Banyaknya Desa/kelurahan yang Melakukan Upaya Menjaga Keamanan Menurut Kabupaten/Kota dan Jenisnya di Provinsi D.I.Yogyakarta, 2018.....	50
Tabel 17.	Jumlah Hakim dan Non Hakim Menurut Jenis Kelamin di Tingkat Pengadilan di Provinsi D.I.Yogyakarta, 2018.....…….....	51
Tabel 18.	Rekapitulasi Narapidana Berdasarkan Jenis Tindak Pidana dan Pidana, 2018.....…….....	52
Tabel 19.	Jumlah Narapidana dan Anak Pidana Berdasarkan Jenis Tindak Pidana di Provinsi D.I. Yogyakarta, 2018…….….....	54
Tabel 20	Jumlah PNS Menurut Eselon dan Jenis Kelamin, 2018….....	55
Tabel 21	Jumlah Anggota DPRD Provinsi Menurut Asal Partai Politik dan Jenis Kelamin di Provinsi D.I. Yogyakarta, 2018 .....……..	56
Tabel 22	Jumlah Anggota DPRD Menurut Partai Politik dan Kabupaten/Kota di Provinsi D.I. Yogyakarta, 2018 .....…….…….	57
Tabel 23	Jumlah Anggota DPRD Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Provinsi D.I. Yogyakarta, 2018…….....	58
Tabel 24	Jumlah Anggota DPRD Menurut Tingkat Pendidikan dan Jenis Kelamin di Provinsi D.I. Yogyakarta, 2018 .....……..	58
Tabel 25	Jumlah Penduduk yang Terdaftar Dalam Pemilu Legislatif 2014 dan Hasil Perolehan Suara untuk DPRD Provinsi di Provinsi D.I Yogyakarta.…….....……...…….	59
Tabel 26.	Jumlah Penduduk yang Terdaftar Dalam Pemilu Legislatif 2014 dan Hasil Perolehan Suara untuk DPRD Kabupaten/Kota di Provinsi D.I Yogyakarta.....…….....…….	59
Tabel 27.	Jumlah Calon Anggota Legislatif Pemilu 2014 di Provinsi D.I. Yogyakarta	60
Tabel 28	Jumlah Penduduk yang Terdaftar Dalam Pemilu Presiden 2014 dan Hasil Perolehan Suara di Provinsi D.I. Yogyakarta…..……	60
Tabel 29	Alokasi Anggaran Sektor Pendidikan dan Sektor Kesehatan di Provinsi D.I. Yogyakarta, 2014-2018 (dalam rupiah).....	61
Tabel 30	Jumlah Produk Hukum yang Dihasilkan DPRD Provinsi D.I. Yogyakarta, 2014–2018.....…….....…	61

http://yogyakarta.bps.go.id

Tabel 31	Waktu Pelaksanaan dan Banyaknya Pasangan Calon pada Pemilihan Bupati/Walikota dan Wakil Bupati/Wakil Walikota Terakhir di Provinsi D.I.Yogyakarta	62
Tabel 32	Jumlah Pemilih Terdaftar dan Menggunakan Hak Pilih pada Pemilihan Kepala Daerah Tingkat Kabupaten/kota di Provinsi D.I. Yogyakarta…….....	62
Tabel 33	Perolehan Suara dan Partai Pendukung Kepala Daerah Tingkat Kabupaten/kota di Provinsi D.I. Yogyakarta...……....	63
Tabel 34	Kepala Daerah Tingkat Kabupaten/Kota Hasil Pilkada Terakhir Menurut Jenis Kelamin, Pendidikan, Usia, dan Jabatan Sebelumnya di Provinsi D.I. Yogyakarta …….....……...	63
Tabel 35	Perkembangan Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) D.I. Yogyakarta, 2014-2018……..….....…....	64
Tabel 36	Perkembangan Skor Indikator IDI 2017 dan 2018…….....….	65

https://yogyakarta.bps.go.id

https://yogyakarta.bps.go.id

STATISTIK POLITIK DAN KEAMANAN D.I. YOGYAKARTA 2018

CRIME CLOCK

1 kejahatan terjadi setiap 1 jam 38 menit 51 detik

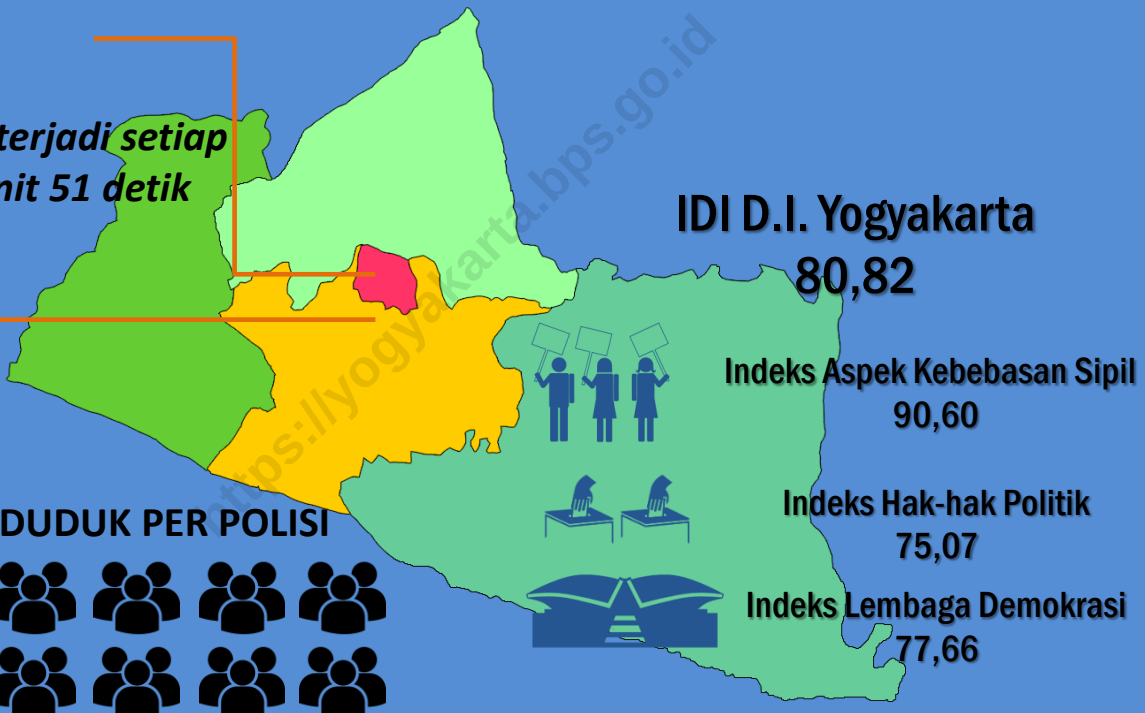

RASIO PENDUDUK PER POLISI

1 : 385

UPAYA DESA MENJAGA KEAMANAN (2018)

392 Desa Membangun Pos Kamling

376 Desa Pelaporan Tamu Lebih dari 24 Jam

347 Desa Membentuk Regu Keamanan Lingkungan

222 Desa Menambah Anggota Hansip

https://yogyakarta.bps.go.id

BAB I

PENDAHULUAN

https://yogyakarta.bps.go.id

https://yogyakarta.bps.go.id

PENDAHULUAN 1

1.1. Latar Belakang

Tahun 2018 merupakan tahun krusial bagi dunia politik di Indonesia. Pada tahun tersebut, seluruh komponen politik di tanah air menjadikannya sebagai titik awal persiapan perhelatan politik yang akan digelar di tahun 2019. Berbagai persiapan besar seperti penetapan calon presiden, penggalangan mitra koalisi, dan juga penetapan calon anggota legislatif dilakukan di tahun 2018. Terlebih lagi, pesta demokrasi pada tahun 2019 menggabungkan pemilihan presiden dan pemilihan legislatif pada saat yang bersamaan. Dengan demikian, situasi politik pada tahun 2018 berada dalam suhu yang tinggi dan penuh dengan dinamika.

Polarisasi politik masyarakat sebagai dampak dari memanasnya kontestasi menjelang pilpres dan pileg sangat terasa di tahun 2018. Situasi politik di tingkat nasional tersebut, tentunya juga memiliki imbas di tingkat daerah. Demikian halnya dengan provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Situasi politik dan keamanan di wilayah tersebut juga dipengaruhi oleh dinamika politik dan keamanan di tingkat nasional. Namun demikian, sebagai wilayah yang terkenal dengan keluhuran budaya dan kearifan masyarakatnya, situasi politik yang cukup dinamis tersebut dapat diredam.

https://yogyakarta.bps.go.id

Selain itu, pamor D.I. Yogyakarta sebagai pewaris kerajaan besar Mataram dan peran sejarah yang sangat penting dalam perjalanan kehidupan kebangsaan Indonesia, menjadikan wilayah ini sangat diperhitungkan dalam percaturan politik nasional. Pemimpin D.I. Yogyakarta dengan kharisma yang sangat kuat, menjadikannya sebagai salah satu tokoh yang disegani dalam kancah politik Indonesia. Kombinasi hal tersebut menjadikan D.I. Yogyakarta sebagai salah satu barometer politik nasional.

Sebagaimana kita ketahui, kondisi politik dan keamanan yang stabil merupakan modal penting bagi keberhasilan pembangunan. Stabilitas politik dan keamanan akan memberikan kenyamanan dan kepastian dalam berinvestasi dan berusaha. Stabilitas politik merupakan salah satu faktor penting untuk memberikan kepercayaan kepada investor asing. Adanya kesadaran masyarakat untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat di lingkungan wilayahnya dan meningkatnya kesadaran hukum masyarakat memberikan dorongan untuk memprioritaskan kepentingan bersama, sehingga kestabilan

keamanan di masyarakat dapat terwujud. Pada tahun 2018, stabilitas ekonomi, politik, dan keamanan D.I. Yogyakarta dalam kondisi baik.

Dalam mempertahankan hidupnya, manusia memerlukan kebutuhan dasar yang harus terpenuhi, seperti sandang, pangan, dan papan. Selain itu, manusia juga berusaha untuk memenuhi kebutuhan sekunder, seperti halnya kebutuhan sosial yang meliputi status sosial, peranan sosial, aktualisasi diri, dan rasa aman. Rasa aman ditandai dengan hidup yang tidak tertekan atau bahkan merasa bahwa hidup ini ada gunanya. Rasa aman merupakan salah satu hak asasi setiap orang. Hal itu sesuai dengan amanat Pembukaan UUD 1945 yang berbunyi "..Pemerintah dan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia..". Kewajiban ini secara eksplisit juga tertuang dalam Pasal 30 ayat (4), amandemen kedua UUD 1945 yang antara lain menyebutkan bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) adalah alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat serta bertugas melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat serta menegakkan hukum.

Rasa aman pada dasarnya merupakan variabel kompleks karena mencakup aspek dan dimensi yang sangat luas yaitu politik, sosial, dan ekonomi. Statistik dan indikator yang biasa digunakan untuk mengukur rasa aman masyarakat menggunakan indikator negatif, misalnya angka kriminalitas (*crime total*). Semakin tinggi angka kriminalitas menunjukkan semakin banyak tindak kejahatan pada masyarakat yang mengindikasikan bahwa masyarakat merasa semakin tidak aman. Sejalan dengan itu, upaya untuk memenuhi dan menciptakan rasa aman pada masyarakat merupakan langkah strategis yang turut mempengaruhi keberhasilan pembangunan nasional.

Terciptanya dan terpenuhinya rasa aman pada masyarakat akan membangun suasana yang kondusif bagi masyarakat untuk melakukan berbagai aktifitas termasuk aktifitas ekonomi. Kondisi ini pada skala makro akan menciptakan stabilitas nasional yang merupakan salah satu prasyarat bagi tercapainya pembangunan dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur. Mewujudkan keamanan merupakan tanggung jawab semua lapisan masyarakat yang didukung dengan sarana dan prasarana yang disediakan pemerintah. Selain itu, juga diperlukan kesadaran masyarakat untuk ikut menciptakan lingkungan yang aman dan kondusif.

https://yogyakarta.bps.go.id

Publikasi Statistik Politik dan Keamanan 2018 ini menyajikan berbagai informasi terkait fenomena politik dan keamanan selama tahun 2018. Data tersebut bagi pemerintah akan dipergunakan untuk evaluasi, perencanaan, dan monitoring terhadap situasi politik dan keamanan khususnya di D.I. Yogyakarta.

1.2.Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan publikasi ini adalah memberikan gambaran mengenai situasi dan kondisi keamanan serta politik di masyarakat. Tujuan khususnya adalah untuk memperoleh gambaran secara lengkap mengenai karakteristik kejadian tindak kriminalitas, konflik massal, dan peranserta semua elemen masyarakat dalam menjaga stabilitas keamanan dan pembangunan politik.

1.3.Ruang Lingkup

Publikasi Statistik Politik dan Keamanan Daerah Istimewa Yogyakarta 2018 menyajikan gambaran kejadian tindak kejahatan/kriminalitas dan kejadian konflik massal di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta. Publikasi ini juga menyajikan gambaran situasi politik di Daerah Istimewa Yogyakarta. Cakupan penyajian publikasi ini dalam lingkup provinsi. Namun beberapa statistik disajikan sampai level kabupaten/kota secara series.

https://yogyakartabps.go.id

1.4. Sistematika Penyajian

Publikasi ini secara keseluruhan disajikan dalam empat bagian (bab) yang disusun secara sistematis. Bab I menjelaskan latar belakang dan tujuan penyusunan publikasi. Bab II menjelaskan metodologi yang digunakan dalam penyusunan publikasi ini meliputi jenis dan sumber data, konsep/definisi, dan penjelasan teknis tentang statistik/indikator yang disajikan. Bab III menyajikan gambaran umum kriminalitas di D.I. Yogyakarta. Bab IV menyajikan gambaran umum politik di D.I. Yogyakarta.

https://yogyakarta.bps.go.id

BAB II
METODOLOGI

https://jogjakarta.bps.go.id

https://yogyakarta.bps.go.id

METODOLOGI 2

2.1 Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam publikasi ini berasal dari data Badan Pusat Statistik (BPS) dan data sekunder dari dinas/instansi terkait. Pengumpulan data dengan melakukan kompilasi hasil registrasi/catatan. Data yang bersumber dari BPS antara lain Potensi Desa (Podes) 2014 dan Indeks Demokrasi Indonesia (IDI). Sedangkan data dari dinas/instansi terkait, antara lain berasal dari Kepolisian (Polres/Polresta/Polda), Kejaksaan, Pengadilan, Kementrian Hukum dan HAM, Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD), Kesbangpol, Sekretariat Dewan, Badan Kepegawaian Daerah, dan DPPKA Pemerintah Daerah D.I.Yogyakarta.

https://yogyakarta.bps.go.id

2.2 Konsep dan Definisi

A. Peristiwa kejahatan (kriminalitas)/pelanggaran

1. Tindak kejahatan/kriminalitas atau pelanggaran merupakan perbuatan seseorang yang dapat diancam hukuman berdasarkan KUHP atau Undang-Undang serta peraturan lainnya yang berlaku di Indonesia.
2. Peristiwa yang dilaporkan ialah setiap peristiwa yang diterima kepolisian dari laporan masyarakat, atau peristiwa di mana pelakunya tertangkap tangan oleh kepolisian.
3. Peristiwa yang diselesaikan oleh kepolisian adalah:
    a. Peristiwa yang berkas perkaranya sudah siap atau telah diserahkan kepada jaksa.
    b. Dalam hal delik aduan, pengaduan yang dicabut dalam tenggang waktu yang telah ditentukan menurut undang-undang.
    c. Peristiwa yang telah diselesaikan oleh kepolisian berdasarkan azas *Plichmatigheid.*
    d. Peristiwa yang tidak termasuk kompetensi kepolisian.
    e. Peristiwa yang tersangkanya meninggal dunia.
    f. Peristiwa yang telah kadaluwarsa.

B. Pelaku Kejahatan

Pelaku kejahatan adalah:

a. Orang yang melakukan kejahatan.
b. Orang yang turut melakukan kejahatan.
c. Orang yang menyuruh melakukan kejahatan.
d. Orang yang membujuk orang lain untuk melakukan kejahatan.
e. Orang yang membantu untuk melakukan kejahatan.

C. Kejahatan Konvensional (*Common Law Crime*)

Kejahatan konvensional *(Common Law Crime*) adalah kejahatan yang dianggap oleh semua orang sebagai kejahatan misalnya pembunuhan, perkosaan, perampokan, dan penyerangan. Pelaku menggunakannya sebagai *Part Time Carreer* dan seringkali untuk menambah penghasilan dari kejahatan. Perbuatan ini berkaitan dengan tujuan-tujuan sukses ekonomi, akan tetapi dalam hal ini terdapat reaksi dari masyarakat karena nilai pemilikan pribadi telah dilanggar.

D. Kejahatan Transnasional

Kejahatan Transnasional adalah kejahatan yang tidak hanya bersifat lintas batas negara, tetapi termasuk juga kejahatan yang dilakukan di suatu negara, tetapi berakibat fatal bagi negara lain. Suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai kejahatan apabila terdapat piranti hukum yang dilanggar sehingga bisa saja terjadi suatu perbuatan yang dirumuskan, dirancang, disiapkan, dilaksanakan dalam suatu negara bisa saja bukan merupakan kejahatan namun ketika hasil kejahatan yang diatur, disiapkan melakukan lintas batas negara untuk masuk ke yuridiksi negara yang berbeda.

E. Jumlah Tindak Kejahatan yang Dilaporkan (*Crime Total*)

Jumlah tindak kejahatan yang dilaporkan *(Crime Total)* adalah jumlah peristiwa yang dilaporkan, yaitu setiap peristiwa yang diterima kepolisian dari laporan masyarakat, atau peristiwa yang pelakunya tertangkap tangan oleh polisi. Indikator ini memberikan gambaran jumlah tindak pidana yang terjadi pada kurun waktu tertentu dengan tidak menutup kemungkinan masih adanya kasus yang tidak tercatat "*dark number*".

https://yogyakarta.bps.go.id

F. Jumlah Tindak Kejahatan yang Diselesaikan (*Crime Cleared*)

Jumlah tindak kejahatan yang diselesaikan *(Crime Cleared)* merupakan statistik yang menggambarkan jumlah kasus penyelesaian tindak pidana oleh polisi yang terjadi pada kurun waktu tertentu.

G. Resiko Penduduk Terkena Tindak Kejahatan (*Crime Rate*)

Resiko penduduk terkena tindak kejahatan *(Crime Rate)* adalah angka yang mengindikasikan peluang penduduk berisiko terkena tindak pidana per seratus ribu penduduk. Indikator ini mengindikasikan resiko penduduk terkena tindak pidana pada suatu waktu tertentu. Perbandingan antar waktu menunjukkan perkembangan tingkat keamanan penduduk.

H. Pelaku Tindak Kriminalitas

Pelaku tindak kriminalitas adalah orang yang melakukan, turut/menyuruh melakukan, membujuk orang lain, dan membantu melakukan tindak kriminalitas. Klasifikasi pelaku tindak kriminalitas menurut umur (KUHP);

- Anak-anak adalah orang yang berumur kurang dari 16 tahun.
- Dewasa adalah orang yang berumur 16 tahun dan lebih.
- Umum adalah anak-anak dan dewasa.

I. Tahanan

Tahanan adalah tersangka pelaku tindak kejahatan/pelanggaran yang ditahan oleh pihak kepolisian sebelum diteruskan kepada kejaksaan atau masih dalam proses pengusutan lebih lanjut. Lamanya ditahan tidak melebihi 20 hari.

J. Kerugian

Kerugian adalah hilang, rusak atau musnahnya harta benda yang ditimbulkan akibat dari suatu peristiwa kejahatan/pelanggaran dan tidak termasuk korban jiwa atau badan.

K. Korban Kejahatan

Korban kejahatan adalah seseorang atau harta bendanya yang ditimbulkan akibat dari suatu peristiwa kejahatan/pelanggaran dan tidak termasuk korban jiwa atau badan.

L. Konflik Massal dalam Podes

Konflik massal dalam Podes merujuk pada konflik berupa perkelahian massal yang terjadi dalam satu wilayah desa/kelurahan meliputi;

https://yogyakarta.bps.go.id

- Perkelahian antar kelompok warga adalah perkelahian antara kelompok warga dengan kelompok warga yang lain dalam satu desa/kelurahan/nagari.
- Perkelahian warga antar desa/kelurahan adalah perkelahian antara warga desa/kelurahan/nagari dengan warga desa/kelurahan/nagari lainnya.
- Perkelahian warga dengan aparat keamanan adalah perkelahian antara warga desa/kelurahan/nagari dengan aparat keamanan.
- Perkelahian warga dengan aparat pemerintah adalah perkelahian antara warga desa/kelurahan/nagari dengan aparat pemerintah.
- Perkelahian antar pelajar/mahasiswa adalah perkelahian antar pelajar suatu sekolah dengan pelajar sekolah lain.
- Perkelahian antar suku/etnis adalah perkelahian antar suku/etnis yang terjadi di desa/kelurahan/nagari.
- Lainnya, antara lain perkelahian antar warga dengan pelajar/mahasiswa, perkelahian antar agama, perkelahian antar aparat keamanan, dan sebagainya.

M. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) adalah lembaga legislatif yang mewakili rakyat di tingkat provinsi atau kabupaten/kota, memiliki fungsi legislasi (membuat peraturan daerah), penyusunan anggaran, dan pengawasan kerja pemerintah daerah.

N. Komisi Pemilihan Umum (KPU)

Komisi Pemilihan Umum (KPU) adalah penyelenggara pemilihan umum di Indonesia yang memiliki struktur berjenjang di tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota.

O. Partai Politik

Partai Politik adalah organisasi penyalur keterlibatan warganegara dalam mempengaruhi kebijakan-kebijakan publik atau perebutan kekuasaan dan jabatan publik.

P. Pemilihan Umum

Pemilihan Umum selanjutnya disebut Pemilu, adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila

https://yogyakarta.bps.go.id

dan Undnag-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UU No. 8/2012).

Q. Peserta Pemilu Legislatif

Peserta pemilu legislatif adalah partai politik untuk pemilu anggota DPR, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota dan perseorangan untuk Pemilu anggota DPD (UU No.10/2008).

2.3 Penjelasan Teknis

Beberapa indikator keamanan yang ditampilkan dalam publikasi ini adalah;

a. Angka Indeks Kejahatan (I_t)

$$I_t = \frac{\textit{Jumlah peristiwa kejahatan pada tahun } t}{\textit{Jumlah peristiwa kejahatan pada tahun } t_o} \times 100$$

dimana : t_o = tahun dasar
t = tahun t

b. Angka Kejahatan per 100.000 Penduduk (*crime rate*)

$$= \frac{\textit{Jumlah peristiwa kejahatan pada tahun } t}{\textit{Jumlah penduduk}} \times 100.000$$

c. Skala Waktu Kejahatan Tahun t (*crime clock*)

$$= \frac{\textit{365 x 24 x 60 x 60}}{\textit{Jumlah peristiwa kejahatan tahun } t} \textit{ x (detik)}$$

d. Persentase Penyelesaian Peristiwa Kejahatan (*crime clearence*)

$$= \frac{\textit{Jumlah peristiwa kejahatan yang diselesaikan}}{\textit{Jumlah peristiwa kejahatan yang dilaporkan}} \times 100\ (\%)$$

e. Indeks Kejahatan (*crime index)*

$$\textit{Indeks Kejaha}\tan = \frac{\textit{Jumlah Tindak Pidana pada tahun } t}{\textit{Jumlah Tindak Pidana pada tahun } t_0} \textit{ x } 100\%$$

https://yogyakarta.bps.go.id

https://yogyakarta.bps.go.id

BAB III

GAMBARAN UMUM KRIMINALITAS DI D.I. YOGYAKARTA

https://jogjakarta.bps.go.id

https://yogyakarta.bps.go.id

GAMBARAN UMUM KRIMINALITAS DI D.I. YOGYAKARTA

3

3.1 Sarana dan Prasarana Keamanan Wilayah

Keamanan suatu wilayah merupakan tanggungjawab bersama baik pemerintah maupun warga negara. Kondisi keamanan wilayah dipengaruhi oleh berbagai hal. Salah satu faktor yang mempengaruhi antara lain tercukupinya jumlah personil keamanan. Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang bertugas menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat, serta menegakkan hukum. Selain kepolisian, keberadaan pertahanan sipil (Hansip) atau perlindungan masyarakat (Linmas) sangat membantu dalam menciptakan keamanan khususnya di tingkat desa. Selain personil keamanan, perlu juga dukungan dari masyarakat serta ketersediaan sarana dan prasarana keamanan yang memadai.

Dalam rangka menjaga stabilitas keamanan wilayah, D.I. Yogyakarta didukung dengan kelengkapan prasarana keamanan, antara lain 1 polda, 5 polres/polresta, 80 polsek/polsekta dan 46 pos polisi yang tersebar di seluruh wilayah kabupaten/kota. Polisi merupakan garda terdepan dalam mencegah kriminal dan merupakan satuan organisasi keamanan yang memberikan pelayanan terhadap masyarakat khususnya dalam hal keamanan dan ketertiban masyarakat. Sebagai aparat penegak hukum, jumlah polisi yang bertugas di wilayah D.I. Yogyakarta pada tahun 2018 sebanyak 9.874 personil. Jumlah personil polisi tahun 2018 dibanding dengan tahun 2017 menunjukkan adanya penurunan. Adapun menurut jenis kelamin, mayoritas polisi di D.I. Yogyakarta adalah laki-laki sebanyak 90,37 persen. Sementara jumlah polisi wanita sebanyak 9,73 persen. Tingginya jumlah polisi laki-laki dibandingkan polisi wanita diduga terkait dengan perekrutan polisi yang disesuaikan dengan kebutuhan di lapangan.

Turunnya jumlah personil polisi dan pertambahan jumlah penduduk di D.I. Yogyakarta mengakibatkan rasio penduduk per polisi semakin meningkat. Hal ini mengakibatkan rata-rata beban tugas polisi dalam memberikan pelayanan terhadap masyarakat semakin meningkat. Selain itu, meningkatnya rasio penduduk per polisi juga mempunyai potensi pada berkurangnya efektivitas pelayanan kepolisian kepada masyarakat. Kondisi tersebut harus dapat diantisipasi agar tidak berpengaruh pada

https://yogyakarta.bps.go.id

besarnya pengaduan masyarakat yang tidak tertangani dengan baik, penyidikan berlarut-larut, atau keterlambatan polisi di tempat kejadian perkara.

Rasio penduduk per polisi di D.I. Yogyakarta pada tahun 2018 sebesar 1: 385, yang artinya bahwa setiap 1 personil polisi melayani 385 penduduk. Angka ini meningkat dibandingkan dengan tahun 2017 dengan rasio sebesar 1: 374. Hal ini menunjukkan bahwa rata-rata beban tugas polisi dari tahun 2017 ke tahun 2018 mengalami peningkatan. Apabila dilihat menurut kabupaten/kota, rasio penduduk per polisi terbesar pada tahun 2018 berada di Kabupaten Gunungkidul yaitu 1: 685. Angka tersebut sudah mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun 2017 sebesar 656. Sedangkan rasio terkecil berada di Kota Yogyakarta sebesar 1: 277. Artinya bahwa seorang polisi di Kabupaten Gunungkidul mempunyai beban pelayanan paling besar dibandingkan dengan polisi di wilayah kabupaten/kota lainnya, sedangkan beban pelayanan terkecil berada di Kota Yogyakarta. Dengan kata lain, seorang polisi di Gunungkidul harus bekerja tiga kali lebih keras dibandingkan dengan polisi di Kota Yogyakarta. Selain Gunungkidul, beban polisi di wilayah Sleman dan Bantul juga relatif berat. Di kedua kabupaten tersebut, rasio polisi penduduk berturut-turut adalah sebesar 1:671 dan 1:670.

Gambar 3.1. Rasio Penduduk per Polisi di D.I. Yogyakarta, 2018

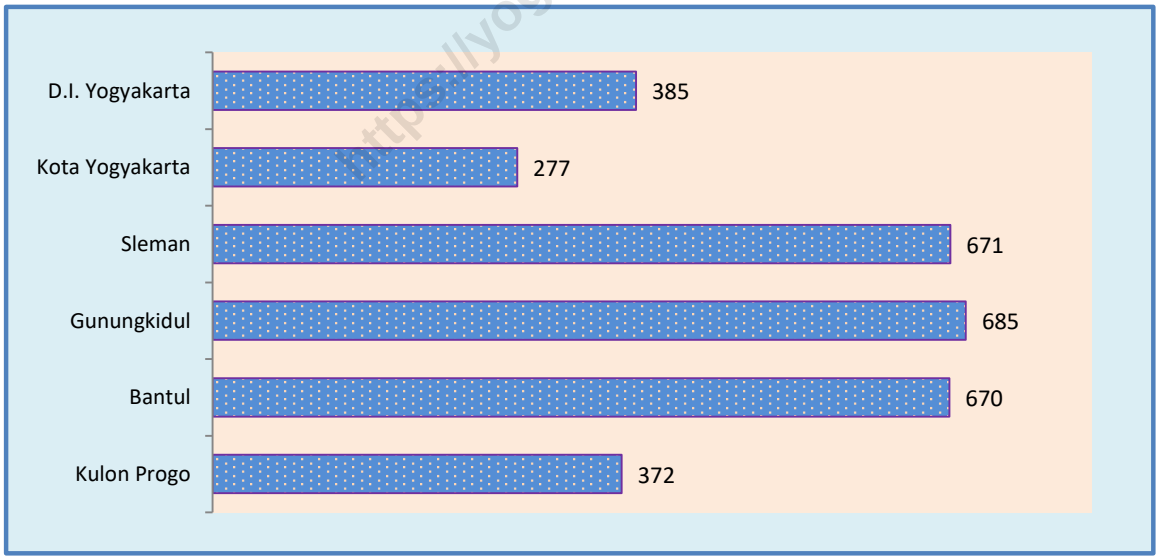

Sumber : Polda D.I. Yogyakarta

Keberadaan pos polisi dan poskamling merupakan salah satu prasarana pendukung yang sangat dibutuhkan dalam pelayanan keamanan masyarakat. Hasil Podes 2018 menunjukkan bahwa di Daerah Istimewa Yogyakarta terdapat 114 desa/kelurahan yang mempunyai pos polisi atau sekitar 26,03 persen, sedangkan 392 desa/kelurahan (89,50 %) mempunyai poskamling. Jumlah pos polisi yang paling banyak berada di

Kabupaten Sleman sebanyak 30 pos polisi, sedangkan poskamling terbanyak berada di Kabupaten Gunungkidul yang berada di 132 desa.

Selain keberadaan sarana pos polisi dan poskamling, banyaknya personil pertahanan sipil (hansip) di tiap desa/kelurahan akan sangat membantu menjaga stabilitas keamanan. Hansip merupakan warga masyarakat yang disiapkan dan dibekali pengetahuan serta keterampilan untuk melaksanakan kegiatan penanganan bencana, ikut memelihara keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat, serta kegiatan sosial kemasyarakatan. Hasil Podes 2018 menunjukkan bahwa jumlah hansip yang ada di D.I. Yogyakarta sebanyak 22.634 orang dengan rasio hansip per desa/kelurahan mencapai 1:52, artinya untuk setiap 1 desa/kelurahan terdapat 52 orang hansip. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya dimana rasio hansip per desa mencapai 60 orang hansip di setiap desa, terlihat adanya penurunan. Kondisi ini juga mengindikasikan beban kerja hansip yang semakin meningkat. Apabila dilihat menurut kabupaten/kota, rasio hansip terhadap desa/kelurahan paling kecil berada di Kabupaten Gunungkidul dan Kulon Progo yaitu 1:42 artinya setiap 1 desa dilayani oleh 42 orang hansip, sedangkan rasio hansip terhadap desa/kelurahan paling besar berada di Kabupaten Bantul yaitu 1:65 artinya setiap desa dilayani oleh sekitar 86 orang hansip. Turunnya rasio jumlah hansip per desa menunjukkan peningkatan beban kerja hansip dan juga dapat meningkatkan potensi gangguan keamanan di suatu wilayah.

https://yogyakarta.bps.go.id

3.2 Perkembangan Tindak Kejahatan di D.I. Yogyakarta

Tindak kejahatan atau kriminalitas di suatu wilayah merupakan suatu bentuk perilaku yang menyimpang yang ada di masyarakat. Perilaku yang menyimpang tersebut merupakan suatu ancaman terhadap norma-norma sosial yang dapat menimbulkan ketegangan individu maupun ketegangan sosial dan merupakan ancaman bagi berlangsungnya ketertiban sosial. Tindak kejahatan yang dilaporkan ke pihak kepolisian di D.I. Yogyakarta selama 3 tahun terakhir cenderung menunjukkan adanya penurunan meskipun berfluktuasi. Pada tahun 2016, terdapat sebanyak 6.766 tindak kejahatan yang dilaporkan. Setahun kemudian, jumlahnya turun menjadi 5.194 kasus kejahatan yang dilaporkan. Selanjutnya pada tahun 2018, tindak kejahatan yang dilaporkan kembali meningkat menjadi 5.317 kasus. Dibandingkan dengan kondisi tahun 2016, jumlah tindak kejahatan yang dilaporkan di semua wilayah di D.I. Yogyakarta pada tahun 2018 memperlihatkan adanya penurunan kecuali di Kulon Progo yang tidak mengalami

perubahan. Penurunan yang paling signifikan terjadi di Kota Yogyakarta, dimana jumlah kejahatan yang dilaporkan mengalami penurunan hampir 50 persennya. Pada tahun 2018, tindak kejahatan terbesar masih terjadi di wilayah Kabupaten Sleman yang mencapai 1.939 kasus.

Dari tindak kejahatan yang dilaporkan ke pihak kepolisian, pada tahun 2018 sebesar 49,22 persen kasus dapat terselesaikan. Angka ini meningkat dibanding tahun 2016 sebesar 48,79 persen. Persentase penyelesaian tindak kejahatan (*clearance rate*) selama tiga tahun berturut-turut (2016-2018) menunjukkan adanya fluktuasi. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa kinerja kepolisian dalam penyelesaian tindak kejahatan yang masih perlu ditingkatkan.

Untuk wilayah D.I. Yogyakarta, persentase penyelesaian tindak kejahatan untuk setiap kabupaten/kota menunjukkan adanya variasi. Persentase penyelesaian tindak pidana tertinggi terdapat di Gunungkidul yang mencapai 65,99 persen. Kepolisian di Bantul juga mencatatkan tingkat penyelesaian kejahatan yang relatif tinggi yaitu, sebesar 60,47 persen.

https://yogyakarta.bps.go.id

Gambar 3.2 Selang Waktu Terjadinya Tindak Kejahatan (*Crime Clock*) di D.I. Yogyakarta, 2016-2018

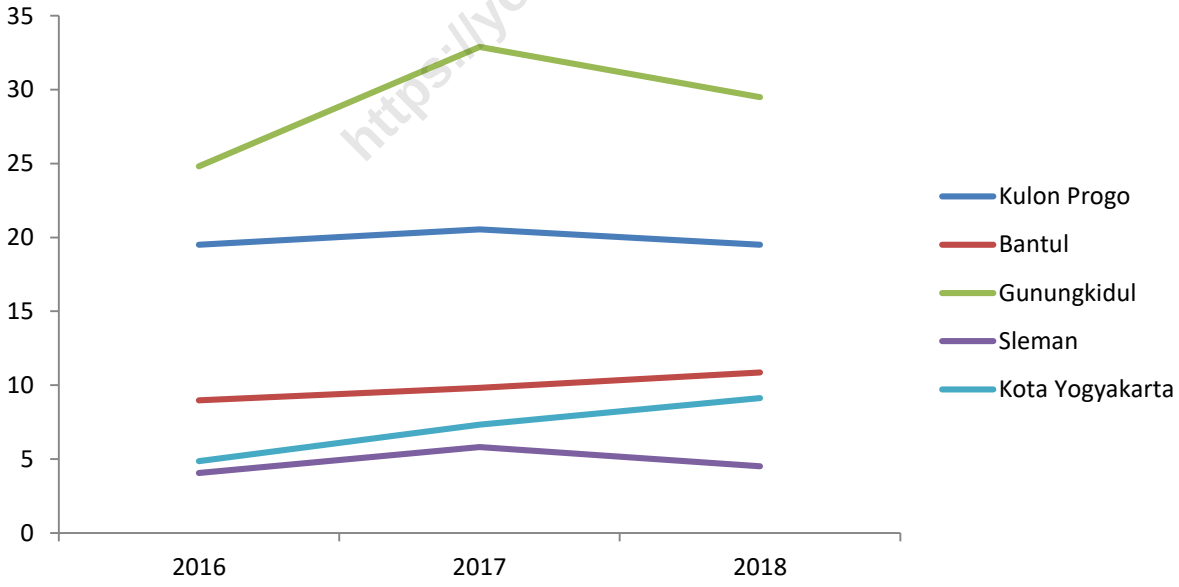

Sumber : Polda D.I. Yogyakarta

Kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat dapat dilihat dari selang waktu kejahatan (*crime clock*). Selang waktu kejahatan adalah selang waktu atau interval waktu terjadinya satu tindak kejahatan dengan kejahatan yang lain. Semakin tinggi nilainya

menunjukkan bahwa kondisi keamanan dan ketertiban di suatu wilayah semakin membaik. Selang waktu terjadinya tindak kejahatan di D.I. Yogyakarta tersaji dalam Gambar 3.2. Pada tahun 2018, selang waktu tindak kejahatan (*crime clock*) di D.I. Yogyakarta adalah 1 jam 38 menit 51 detik, artinya setiap 1 jam 38 menit 51 detik di D.I. Yogyakarta terjadi 1 kasus tindak kejahatan baru. Kondisi ini lebih lambat dibandingkan dengan tahun 2016 yaitu 1 jam 17 menit 24 detik. Hal ini menunjukkan bahwa tindak kejahatan di D.I. Yogyakarta semakin berkurang. Dengan kata lain bahwa kondisi keamanan dan ketertiban di D.I Yogyakarta semakin membaik.

Selang waktu terjadinya tindak kejahatan di kabupaten/kota di Daerah Istimewa Yogyakarta cukup bervariatif. Selang waktu tindak kejahatan yang paling lama terjadi di wilayah Kabupaten Gunungkidul yaitu lebih dari 29 jam, diikuti wilayah Kulon Progo yang terjadi lebih dari 19 jam. Sedangkan selang waktu tindak kejahatan tercepat terjadi di Kabupaten Sleman yaitu 4 jam 31 menit. Dengan melihat selang waktu tindak kejahatan antar wilayah ini, bahwa Kabupaten Sleman merupakan wilayah yang paling rawan terjadinya tindak kejahatan dibanding kabupaten/kota lainnya di D.I. Yogyakarta.

Setiap penduduk memiliki resiko terkena tindak kejahatan. Semakin besar resiko yang dimiliki penduduk menggambarkan bahwa semakin tidak amannya suatu wilayah. Pada tahun 2018, resiko penduduk terkena tindak pidana di D.I. Yogyakarta sebanyak 140 per 100.000 penduduk. Artinya, setiap 100.000 penduduk di D.I. Yogyakarta ada sebanyak 140 penduduk yang berisiko menjadi korban tindak kejahatan. Apabila dibandingkan dengan tahun 2017, resiko terkena tindak kejahatan tersebut menunjukkan adanya penurunan. Dengan semakin menurunnya resiko menjadi korban kejahatan tersebut menunjukkan bahwa tingkat keamanan di D.I. Yogyakarta semakin membaik. Menurut kabupaten/kota, bahwa resiko penduduk terkena tindak kejahatan terbesar yaitu Kota Yogyakarta (224 per 100.000 penduduk), sedangkan di Kabupaten Gunungkidul merupakan wilayah dengan resiko menjadi korban tindak kejahatan terendah yaitu sebesar 40 orang per 100.000 penduduk. Situasi di Kota Yogyakarta yang merupakan pusat perekonomian dan pemerintahan menjadikan kota ini sebagai wilayah yang paling berisiko terkena tindak kejahatan, diikuti Kabupaten Sleman.

https://yogyakarta.bps.go.id

3.3 Jenis-jenis Tindak Kejahatan di D.I. Yogyakarta

Ada beberapa jenis kejahatan yang terjadi di wilayah D.I. Yogyakarta. Berdasarkan hasil Podes 2018, jenis kejahatan yang paling banyak terjadi di D.I. Yogyakarta adalah kejahatan pencurian sebanyak 67,12 persen desa/kelurahan di D.I. Yogyakarta. Kejadian terbanyak kedua, sebesar 27,62 persen dari jumlah desa/kelurahan terdapat kejadian tindak kejahatan penipuan/penggelapan dan 16,89 persen terdapat kejadian tindak kejahatan perjudian. Kondisi tersebut menuntut kewaspadaan dari semua pihak baik pemerintah maupun masyarakat.

Di samping itu, kejahatan narkoba juga relatif tinggi di D.I. Yogyakarta. Terdapat 16,67 persen dari jumlah desa/kelurahan di wilayah ini yang pernah terdapat kejadian tindak kejahatan penyalahgunaan/pengedaran narkoba. Mengingat dampak negatif kejahatan narkoba yang begitu besar, perlu kewaspadaan dan perhatian baik dari masyarakat maupun pemerintah. Selain itu, wilayah D.I. Yogyakarta yang merupakan tujuan wisata dan pendidikan menyebabkan arus lalu lintas manusia dan barang yang cukup tinggi, sehingga rawan bagi perdagangan narkoba.

https://yogyakarta.bps.go.id

Gambar 3.3 Persentase Desa/kelurahan yang ada Tindak Kejahatan Menurut Jenis Kejahatan di D.I. Yogyakarta, 2018

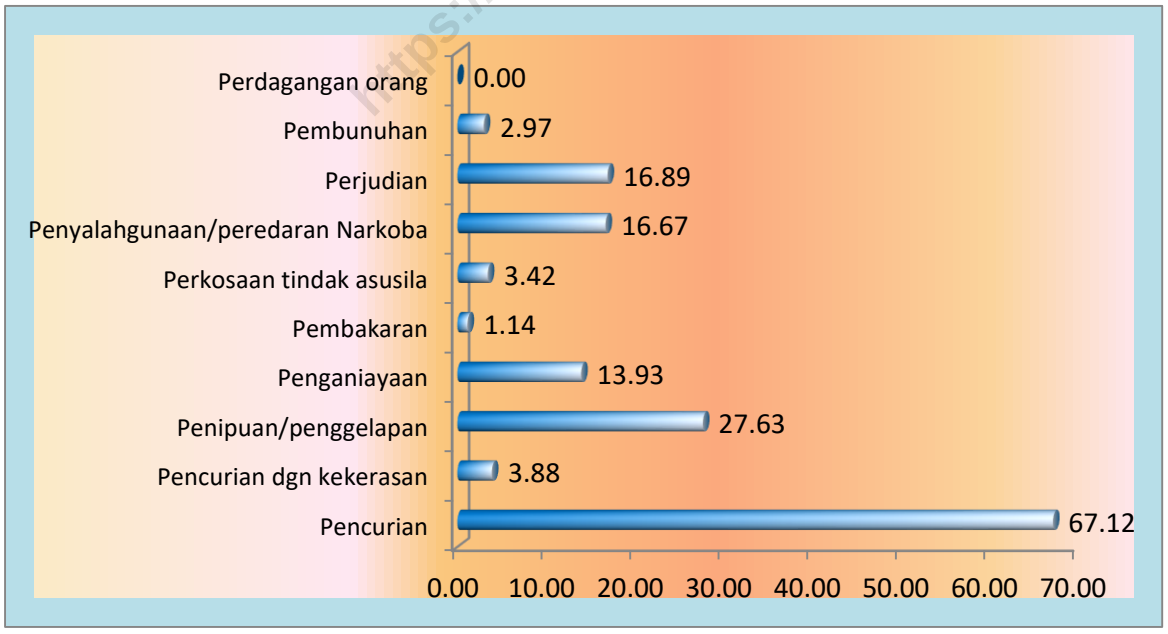

Sumber: BPS, Podes 2018

Hal lain yang cukup memprihatinkan di wilayah D.I. Yogyakarta adalah adanya perkelahian massal. Menurut hasil Podes 2018, di D.I.Yogyakarta perkelahian massal terjadi di 12 desa/kelurahan. Angka perkelahian massal tertinggi terjadi pada jenis perkelahian antar kelompok warga. Kasus tersebut terjadi di 5 desa/kelurahan. Peringkat selanjutnya adalah perkelahian antar pelajar/mahasiswa yang juga terjadi di 5 desa/kelurahan.

Menurut kabupaten/kota, banyaknya desa/kelurahan yang paling banyak terjadi perkelahian massal adalah di Kabupaten Bantul yakni 2 desa terjadi perkelahian antar kelompok warga, 1 desa terjadi perkelahian warga antar desa, dan 2 desa terjadi perkelahian antar pelajar/mahasiswa. Kabupaten Sleman juga mencatatkan kejadian perkelahian masal yang cukup banyak. Terdapat 2 desa dengan kejadian perkelahian antar kelompok warga, 1 desa terjadi perkelahian antar pelajar/mahasiswa dan 1 desa terjadi perkelahian antar suku.

Pada tahun 2018, berdasarkan golongan kejahatan, laporan tindak kejahatan yang paling banyak adalah kejahatan konvensional yaitu sejumlah 5.267 kejahatan. Selama tahun 2016-2018, kejahatan konvensional merupakan kejahatan yang paling banyak terjadi di D.I.Yogyakarta. Pada tahun 2016, kejahatan konvensional mencapai 6.192 kasus, turun menjadi 4.759 kasus pada tahun 2017. Selanjutnya kembali meningkat menjadi 5.267 kasus pada tahun 2018. Golongan kejahatan terbanyak kedua adalah kejahatan transnasional. Terdapat 35 kasus kejahatan transnasional, kondisi tersebut menunjukkan adanya penurunan dibandingkan dengan kondisi tahun sebelumnya.

https://yogyakarta.bps.go.id

Jumlah tindak kejahatan menonjol di Provinsi D.I. Yogyakarta tahun 2018 yang paling banyak terjadi adalah pencurian dengan pemberatan sebanyak 1.282 kasus, diikuti pencurian kendaraan bermotor (curanmor) sebanyak 1.175 kasus, dan pencurian biasa sebanyak 1.076 kasus. Dibandingkan dengan tahun sebelumnya, terlihat bahwa pola tindak kejahatan yang terjadi di D.I. Yogyakarta tidak terlalu mengalami perubahan.

Dari beberapa jenis kejahatan yang terjadi selama tahun 2018 di berbagai wilayah di D.I. Yogyakarta, salah satu jenis kejahatan yang perlu mendapat perhatian khusus adalah kejadian kejahatan narkoba. Selama 3 tahun terakhir (2016-2018), jumlah tindak kejahatan narkoba yang dilaporkan di D.I. Yogyakarta terus meningkat yaitu sebanyak 185 kasus pada tahun 2016, naik menjadi 385 kasus pada tahun 2017, dan meningkat menjadi 520 kasus pada tahun 2018. Dengan kata lain, selama periode 2016 – 2018 telah terjadi kenaikan hampir lima kali lipat untuk kejahatan narkoba.

Selain itu, secara keseluruhan, hampir semua tindak kejahatan di D.I. Yogyakarta menunjukkan adanya peningkatan dibandingkan dengan kondisi sebelumnya. Peningkatan yang cukup signifikan terjadi pada tindak kejahatan yang paling sering terjadi, yaitu pencurian dengan pemberatan (naik 99,38 persen), pencurian kendaraan bemotor (naik 96,82 persen), dan pencurian biasa (naik 94,58 persen).

3.4 Pelaku Tindak Kejahatan dan Upaya Menjaga Keamanan

Selain informasi perkembangan jumlah kejahatan yang terjadi di masyarakat setiap tahun secara berkesinambungan, informasi tentang pelaku tindak kejahatan juga perlu diperhatikan secara serius. Pada tahun 2018, pelaku tindak kejahatan di D.I. Yogyakarta sebanyak 2.425 orang. Dari total pelaku tindak kejahatan, tercatat sebanyak 151 orang adalah anak-anak (6,23 persen) yang semuanya berjenis kelamin laki-laki dan berasal dari berbagai daerah di wilayah D.I. Yogyakarta. Pelaku kejahatan anak-anak tersebut sebagian besar dari tindak kejahatan di Kabupaten Sleman (41,06 persen).

Gambar 3.4 Persentase Pelaku Tindak Kejahatan Menurut Kabupaten/kota di Provinsi D.I. Yogyakarta, 2017

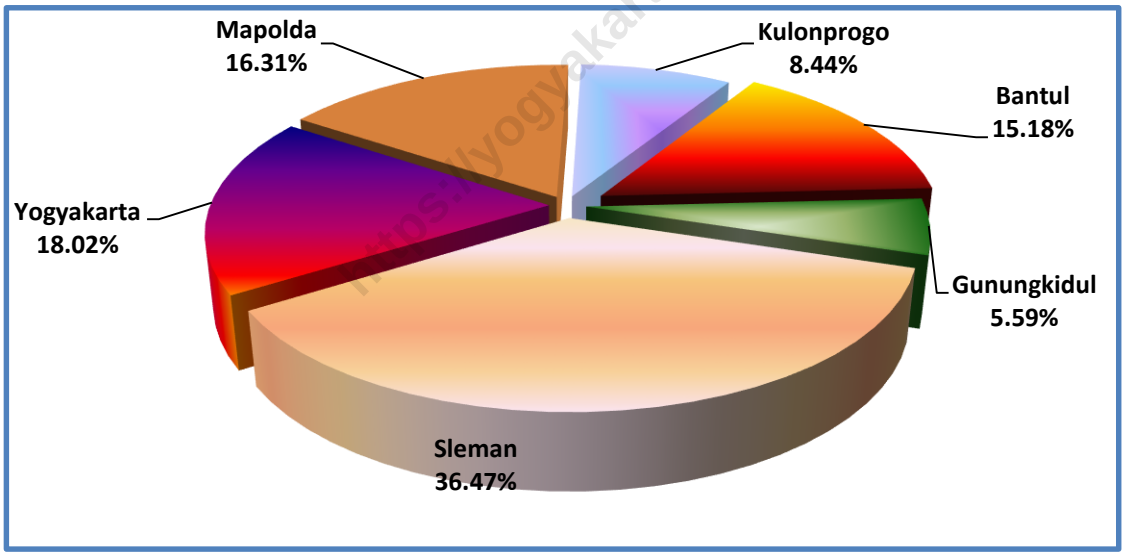

Sumber: Polda D.I. Yogyakarta

Kejadian tindak kejahatan di wilayah D.I. Yogyakarta terjadi secara menyeluruh di kabupaten/kota. Gambar 3.4 menunjukkan presentase pelaku tindak kejahatan menurut kabupaten/kota. Pelaku tindak kejahatan yang paling banyak terdapat di Kabupaten Sleman sebesar 31,38 persen, sedangkan yang paling sedikit ada di Kabupaten Gunungkidul (6,72 persen). Berdasarkan jenis kelamin, secara umum pelaku tindak kejahatan didominasi oleh kaum laki-laki sebanyak 2.105 orang (95,23 persen).

Tindak kejahatan yang terjadi tidak bisa diprediksi sebelumnya. Dalam mencegah terjadinya kejahatan, berbagai cara telah dilakukan oleh warga masyarakat untuk menjaga keamanan. Upaya yang dilakukan diantaranya, membangun poskamling, membentuk regu keamanan lingkungan, memeriksa setiap warga dari luar desa, dan menambah jumlah anggota hansip/linmas. Berdasarkan data Podes 2018, upaya masyarakat dalam menjaga keamanan yang paling banyak dilakukan adalah membangun poskamling yang terdapat di 392 desa/kelurahan. Sementara itu, banyaknya desa/kelurahan yang menjaga keamanan warga dengan cara membentuk regu keamanan lingkungan 347 desa dan pelaporan tamu yang menginap lebih dari 24 jam ke aparat lingkungan 376 persen.

https://yogyakarta.bps.go.id

https://yogyakarta.bps.go.id

BAB IV

GAMBARAN UMUM POLITIK D.I. YOGYAKARTA

https://jogjakarta.bps.go.id

https://yogyakarta.bps.go.id

GAMBARAN UMUM POLITIK DI D.I. YOGYAKARTA

4

4.1 Pemilu Legislatif 2014 dan Pemilu Presiden 2014

Berdasarkan keputusan KPU Nomor 5/kpts/KPU/2013 tentang penetapan partai politik peserta pemilu tahun 2014, terdapat sepuluh partai politik yang dinyatakan memenuhi syarat sebagai peserta pemilu tahun 2014. Kesepuluh partai politik tersebut adalah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Golongan Karya (Golkar), Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Demokrat dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Nasional Demokrat (Nasdem), dan Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura). Selanjutnya, berdasarkan keputusan PTUN, terdapat tambahan dua partai lagi yang juga berhak mengikuti kontestasi politik di tahun 2014, yaitu Partai Bulan Bintang (PBB) dan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI).

Gambar 4.1 Persentase Pemilih dalam Pemilu Legislatif 2014 menurut Hasil Perolehan Suara dan Kabupaten/kota di D.I. Yogyakarta

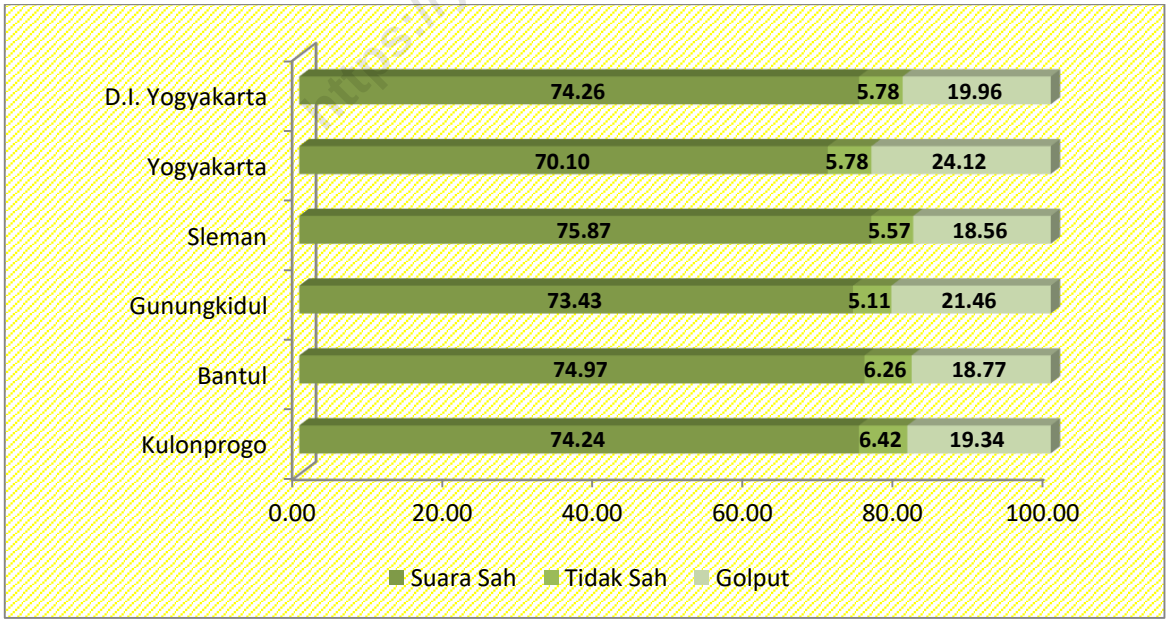

Sumber: KPU Kabupaten/kota/D.I. Yogyakarta

Pada tahun 2014, jumlah penduduk D.I. Yogyakarta yang terdaftar sebagai pemilih dalam Pemilu Legislatif sebanyak 2.771.964 jiwa. Dari jumlah tersebut, sebanyak

2.218.603 jiwa (80,04 persen) menggunakan hak pilihnya dan 553.361 jiwa (19,96 persen) tidak menggunakan hak pilihnya atau golput untuk pemilihan DPRD provinsi.

Gambar 4.1 menunjukkan persentase perolehan suara yang masuk untuk DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota di D.I. Yogyakarta. Untuk DPRD Provinsi, terdapat 74,26 persen suara dinyatakan sah dan 5,78 persen suara dinyatakan tidak sah. Adapun untuk DPRD kabupaten/kota, sebanyak 2.113.068 suara yang dinyatakan sah dan 105.282 suara yang dinyatakan tidak sah. Sedangkan yang tidak menggunakan hak pilihnya atau golput sebanyak 554.275 orang. Jumlah golput untuk DPRD kabupaten/kota lebih banyak dibandingkan untuk DPRD provinsi meskipun selisihnya hanya sedikit. Dalam pemilu legislatif 2014, dari total jumlah pemilih se-D.I. Yogyakarta yang paling banyak berada di Kabupaten Sleman (28,67 persen), diikuti Kabupaten Bantul (26,32 persen).

Berdasarkan data KPUD D.I. Yogyakarta, jumlah pemilih dalam Pemilu Presiden 2014 sebanyak 2.812.144 jiwa. Dari angka tersebut terdapat 76,84 persen yang menggunakan hak pilihnya, 98,50 persen diantaranya merupakan suara sah dan hanya 1,5 persen suara yang dinyatakan tidak sah. Sementara itu, jumlah yang tudak menggunakan hak pilihnya/golput sebanyak 566.980 orang atau 20,16 persen dari total pemilih. Tabel 31 menyajikan jumlah pemilih dan perolehan suara Pemilu Presiden 2014 menurut kabupaten/kota di Daerah Istimewa Yogyakarta.

https://yogyakartabps.go.id

4.2 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)

DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah pada tingkat provinsi/kabupaten/kota di Indonesia. Lembaga ini memiliki fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan. Hasil pemilu pada tahun 2014 di D.I. Yogyakarta untuk DPRD Provinsi, hanya terdapat sembilan partai yang berhasil meloloskan perwakilannya di lembaga ini. Kesembilan partai tersebut berdasarkan urutan perolehan suara di DPRD Provinsi adalah PDIP (14 anggota), PAN (8 anggota), Partai Golkar (8 anggota), Partai Gerindra (7 anggota), PKS (6 anggota), PKB (5 anggota), Partai Nasdem (3 anggota), Partai Demokrat (2 anggota) dan PPP (2 anggota).

Berdasarkan komposisi jenis kelaminnya, anggota DPRD Provinsi D.I. Yogyakarta didominasi oleh laki-laki. Pada tahun 2018, jumlah anggota DPRD Provinsi yang berjenis kelamin laki-laki sebanyak 48 orang (87,27 persen). Sementara anggota perempuan di DPRD tingkat provinsi sebanyak 14,55 persen. Persentase perempuan di lembaga legislatif ini mengalami kenaikan dibandingkan dengan tahun sebelumnya

karena adanya pergantian antar waktu untuk PAN. Meskipun demikina, keterlibatan perempuan di lembaga perwakilan rakyat tersebut masih relatif rendah. Rendahnya keterwakilan perempuan di badan legislatif dapat berimplikasi pada terabaikannya isu-isu perempuan dan kebijakan yang bias gender di wilayah ini.

Jumlah partai yang mempunyai kursi di DPRD kabupaten/kota hasil pemilu 2014 sebanyak 11 partai. Dari 11 partai tersebut, partai yang memiliki anggota dewan paling banyak adalah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) sebanyak 58 anggota. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) mempunyai kursi yang terbanyak di masing-masing kabupaten/kota. Kabupaten/kota dengan jumlah anggota DPRD terbanyak di DI.Yogyakarta masing-masing berturut-turut adalah Kabupaten Sleman (50 orang), Kabupaten Gunungkidul (45 orang), dan Kabupaten Bantul (45 orang).

Berdasarkan kelompok umur, hampir separuh (49,09 persen) dari jumlah anggota DPRD provinsi termasuk dalam kelompok umur 36-49 tahun, dan hanya 9 persen yang memiliki umur 60 tahun ke atas. Hal ini menunjukkan bahwa anggota DPRD tingkat provinsi di D.I. Yogyakarta termasuk dalam golongan umur produktif. Begitu juga untuk anggota DPRD tingkat kabupaten/kota, semua anggota DPRD di seluruh kabupaten/kota di D.I. Yogyakarta sebagian besar memiliki umur antara 36-49 tahun. Berbeda dengan anggota DPRD tingkat provinsi, anggota DPRD tingkat kabupaten/kota ada yang termasuk dalam golongan umur muda yaitu kelompok umur 21-35 tahun sebanyak 10 persen yang tersebar di seluruh kabupaten/kota.

https://yogyakarta.bps.go.id

Berdasarkan tingkat pendidikan terakhir, sebagian besar anggota DPRD tingkat provinsi tahun 2017 berpendidikan D4/S1 sebanyak 40 anggota dewan (72,73 persen), hanya 9 persen yang berpendidikan SLTA ke bawah. Sedangkan untuk anggota DPRD tingkat kabupaten/kota, meskipun sebagian besar berpendidikan D4/S1 (56,36 persen) tapi masih banyak anggota DPRD yang berpendidikan SLTA ke bawah (31,82 persen). Hanya 10 anggota dewan (8,18 persen) yang berpendidikan terakhir S2/S3.

Salah satu peran yang dimiliki DPRD adalah memberikan persetujuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), yang di dalamnya mencakup anggaran sektor pendidikan dan sektor kesehatan. Kedua sektor tersebut memainkan peran penting dalam upaya pembangunan nasional. Selain itu, sektor pendidikan dan kesehatan merupakan dua sektor utama yang menjadi komponen penting bagi upaya penciptaan keadilan sosial dan mempunyai kaitan langsung dengan masyarakat luas. Terkait dengan hal tersebut, pemerintah telah menetapkan keputusan dengan mengalokasikan persentase anggaran

yang lebih besar yaitu minimal 20 persen untuk pendidikan dan 10 persen untuk kesehatan.

Pada tahun 2018, alokasi anggaran untuk sektor pendidikan di D.I. Yogyakarta sebanyak 15,30 persen dari total anggaran. Alokasi ini masih dibawah batas minimal anggaran pendidikan yang ditetapkan oleh pemerintah yakni 20 persen. Kondisi ini perlu mendapat perhatian dan perlu ditingkatkan pada tahun berikutnya agar dapat memenuhi batasan minimal yang telah ditetapkan.

Sementara itu, alokasi anggaran untuk sektor kesehatan di D.I. Yogyakarta sebesar sekitar 3,18 persen. Alokasi ini juga masih belum memenuhi batasan minimal anggaran kesehatan yang ditetapkan pemerintah. Perlu diupayakan kebijakan dan langkah-langkah tertentu agar batasan minimal anggaran untuk kedua sektor tersebut dapat dipenuhi. Hal ini perlu dilakukan sebagai wujud kepedulian pemerintah terhadap masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup dan upaya untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat.

Fungsi legislasi tercermin dari jumlah produk hukum yang dihasilkan oleh DPRD. Gambar 4.2 memberikan informasi mengenai produk hukum yang dihasilkan oleh DPRD Provinsi selama periode 2014 - 2018. Pada periode tersebut, DPRD Provinsi D.I. Yogyakarta menghasilkan 11 peraturan daerah, 90 keputusan DPRD, 1 Peraturan DPRD, dan 129 keputusan pimpinan Dewan.

https://yogyakarta.bps.go.id

Gambar 4.2 Jumlah Produk Hukum yang dihasilkan DPRD Provinsi D.I. Yogyakarta, 2014 - 2018

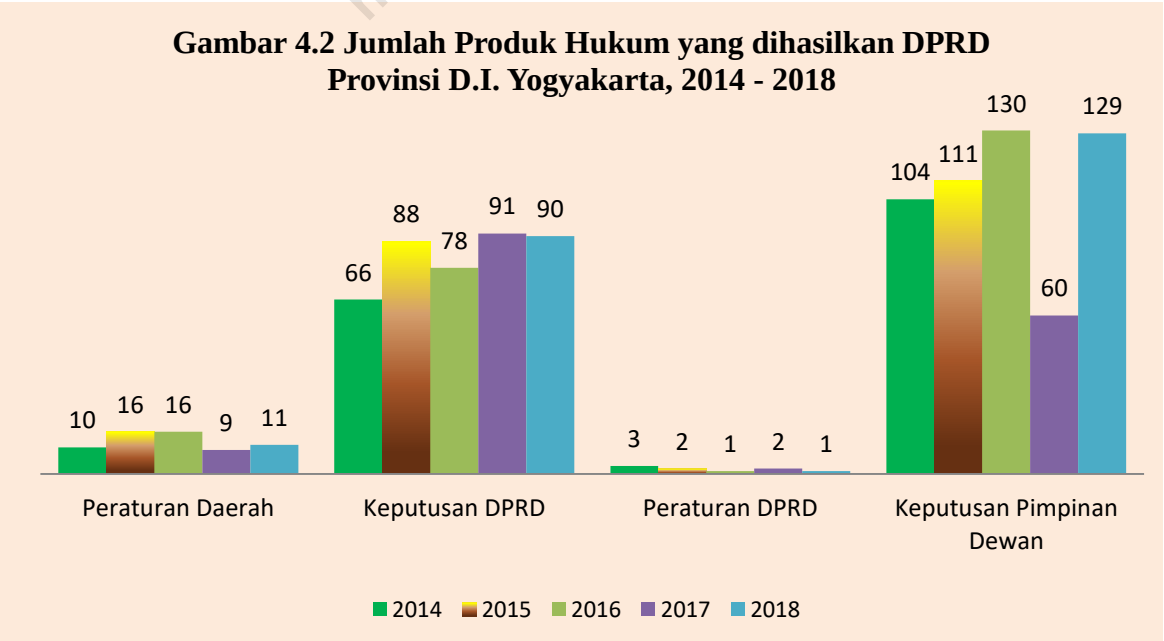

Sumber: Sekretariat DPRD D.I. Yogyakarta

4.3 Pemilihan Kepala Daerah

Pemilihan Kepala Daerah secara langsung merupakan capaian baru dalam demokrasi di Indonesia. Melalui mekanisme tersebut, secara prosedural kedaulatan politik benar-benar berada di tangan rakyat. Melalui Pilkada secara langsung, aspirasi rakyat dalam menentukan sendiri para pemimpin eksekutif daerah tersampaikan secara utuh tanpa distorsi sebagaimana jika dipilih oleh DPRD. Format pilkada secara langsung didasarkan pada Undang-Undang No.32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Selain itu, pemerintah juga menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti UU (Perpu) menyusul keluarnya Keputusan Mahkamah Konstitusi atas permohonan *judicial review* sejumlah KPUD atas UU tersebut. Sebagai operasionalisasi dari UU No.32/2004 dan Perpu, pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) No.6 tahun 2005 yang kemudian diubah menjadi PP No.17 tahun 2005.

Berkaitan dengan pencalonan, berbagai regulasi tentang pilkada mengatur bahwa pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah hanya dapat diajukan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang perolehan kursi dan atau suaranya minimal 15 persen. Pada mulanya hanya partai atau gabungan partai yang memperolah suara/kursi minimal 15 persen di DPRD saja yang berhak mengajukan pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah, namun kemudian dibuka juga bagi gabungan partai yang berada di luar parlemen lokal tersebut.

https://yogyakarta.bps.go.id

Mengenai mekanisme pencalonan ayat 1, 3, dan 5 Pasal 37 PP No. 6/2005 secara berturut-turut mengatur bahwa:

1. Parpol atau gabungan parpol hanya dapat mengusulkan 1 (satu) pasangan calon;
2. Parpol atau gabungan parpol sebelum menetapkan pasangan calon wajib membuka kesempatan yang seluas-luasnya bagi bakal calon perseorangan yang memenuhi syarat untuk dilakukan penyaringan sebagai bakal calon;
3. Proses penyaringan bakal calon sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan secara demokratis dan transparan sesuai dengan mekanisme yang berlaku dalam partai politik atau gabungan partai politik.

Pelaksanaan pilkada tingkat kabupaten/kota di Kabupaten Bantul, Kabupaten Gunungkidul, dan Kabupaten Sleman dilaksanakan secara bersama-sama pada tanggal 9 Desember 2015, sedangkan di Kabupaten Kulonprogo dan Kota Yogyakarta dilaksanakan secara serentak pada tanggal 15 Februari 2017. Jumlah pasangan calon di semua kabupaten/kota sebanyak 2 pasangan, kecuali Kabupaten Gunungkidul sebanyak 4 pasangan. Persentase suara yang sah dan persentase perolehan suara pasangan yang sah

untuk masing-masing kabupaten/kota cukup bervariasi, demikian juga persentase perolehan suara bagi pasangan terpilih. Persentase suara yang sah terhadap jumlah DPT yang paling besar yaitu pada pemilihan bupati dan wakil bupati Kulon Progo yang mencapai 77,52 persen. Sedangkan untuk Kabupaten/kota lainnya dengan persentase lebih dari 65 persen. Hal ini merupakan salah satu bukti bahwa pembangunan politik di D.I. Yogyakarta sudah cukup baik. Selain itu, perolehan suara yang paling besar adalah pasangan Bupati terpilih Kabupaten Kulon Progo yang mencapai 85,68 persen.

Dari 5 kepala daerah tingkat kabupaten/kota di D.I. Yogyakarta, ada seorang kepala daerah yang berjenis kelamin perempuan yaitu Bupati Gunungkidul. Usia kepala daerah saat terpilih pada Pilkada terakhir di atas 50 tahun, dengan usia tertua adalah Bupati Gunungkidul (66 tahun). Sementara, pendidikan terakhir yang ditamatkan oleh kepala daerah mayoritas adalah S1, hanya ada 1 kepala daerah yang berpendidikan terakhir S2. Tiga dari lima kepala daerah sebelumnya sudah menjabat Bupati pada periode sebelumnya.

https://yogyakarta.bps.go.id

4.4. Perkembangan Demokrasi di Daerah Istimewa Yogyakarta

Demokrasi merupakan sistem politik yeng memberikan keadilan dan persamaan bagi semua warga negara. Namun secara praktek di lapangan, demokrasi diterapkan secara berbeda-beda. Penerapan demokrasi beragam, sering kali diterapkan secara sepihak oleh penguasa. Oleh karena itu untuk mengukur sejauh mana pelaksanaan demokrasi di suatu wilayah dan terdapat keterbandingan antar wilayah diperlukan instrumen yang universal.

Sejak tahun 2007, Pemerintah Indonesia telah mengembangkan pengukuran demokrasi yang yang disebut Indeks Demokrasi Indonesia (IDI). Namun demikian, secara resmi IDI baru dirilis sebagai produk resmi pemerintah pada tahun 2010, berupa angka IDI tahun 2009. Di samping level nasional, IDI juga dapat memberikan gambaran perkembangan demokrasi di provinsi- provinsi seluruh Indonesia.

Pada dasarnya IDI merupakan indikator komposit yang digunakan untuk mengukur secara kuantitatif atau untuk mengetahui tingkat perkembangan demokrasi. Indeks ini disusun berdasarkan pelaksanaan dan perkembangan sejumlah aspek demokrasi. Dari indeks tersebut akan terlihat perkembangan demokrasi sesuai dengan ketiga aspek yang diukur. Tiga aspek demokrasi yang dijadikan sebagai dasar penyusunan IDI, yaitu Aspek Kebebasan Sipil, Aspek hak-hak Sipil, dan Aspek Lembaga-lembaga Demokrasi.

Pengumpulan data IDI mengkombinasikan pendekatan kuantitatif dan kualitatif sebagai tahapan yang saling melengkapi. Pada tahap pertama data kuantitatif dikumpulkan dari koding surat kabar dan dokumen tertulis seperti Perda atau peraturan dan surat keputusan kepala daerah, yang sesuai dengan indikator-indikator IDI. Temuan-temuan tersebut kemudian diverifikasi dan dielaborasi melalui *focus group discussion* (FGD) sebagai tahap pengumpulan data kedua, sekaligus menggali kasus-kasus yang tidak tertangkap di koding surat kabar/dokumen. Pada tahap ketiga data-data yang telah terkumpul tersebut diverifikasi melalui wawancara mendalam dengan narasumber yang kompeten memberikan informasi tentang indikator IDI. Semua tahapan pengumpulan data dilakukan oleh BPS Provinsi, diolah di BPS RI, dan diverifikasi oleh Dewan Ahli beserta mitra kerja lain pada semua tahapannya.

Dari sisi penghitungan Indeks, IDI harus melalui tiga tahapan proses yakni *pertama*, menghitung indeks akhir untuk setiap indikator; *kedua*, menghitung indeks provinsi; dan *ketiga*, menghitung indeks keseluruhan atau IDI Nasional. Ketiga tahapan ini secara hierarkhis terkait satu dengan yang lain. Indeks masing-masing indikator IDI (28 indikator) di setiap provinsi memberikan kontribusi dalam penghitungan indeks 11 variabel IDI, selanjutnya indeks 11 varibel memberikan kontribusi terhadap penghitungan indeks tiga aspek IDI. Komposit indeks ketiga aspek IDI inilah yang merefleksikan indeks demokrasi di masing-masing provinsi. Dan pada akhirnya komposit indeks provinsi menentukan IDI Nasional. Penghitungan IDI dilakukan pada tahun berikutnya misalnya IDI Tahun 2016 diukur tahun 2017, IDI tahun 2017 diukur pada tahun 2018 dan sebagainya. Metode pengumpulan data IDI sesuai prosedur menggunakan beberapa tahap antara lain koding koran, koding dokumen, FGD, dan wawancara mendalam.

Pada tahun 2018, dalam skala dalam skala 0 sampai dengan 100, nilai IDI untuk D.I. Yogyakarta adalah 80,82. Jika dibandingkan dengan tahun 2017 dimana IDI D.I. Yogyakarta tercatat sebesar 83,61 kondisi tersebut menunjukkan adanya penurunan sebesar 2,79 poin. Meskipun tingkat perkembangan IDI D.I. Yogyakarta masih berada dalam kategori “baik” namun perlu mendapat perhatian serius karena telah berada di ambang batas bawah kriteria “baik” tersebut.

Perkembangan nilai IDI D.I. Yogyakarta dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2018 menunjukkan adanya fluktuasi. Pada tahun 2009, IDI D.I. Yogyakarta tercatat sebesar 67,55 dan berada dalam kategori “sedang”. Selanjutnya pada tahun 2010, IDI D.I. Yogyakarta meningkat menjadi 74,33 sebelum mengalami penurunan pada tahun 2011

https://yogyakarta.bps.go.id

menjadi 71,67. Pada periode 2013 - 2016, angka IDI D.I. Yogyakarta mengalami peningkatan yang konsisiten hingga mencapai puncaknya pada tahun 2016 dimana angka IDI pada tahun tersebut tercatat sebesar 85,58. Pencapaian IDI pada tahun 2016 tersebut merupakan yang tertinggi untuk perkembangan IDI selama kurun waktu 2009 - 2018. Selanjutnya nilai IDI D.I. Yogyakarta mengalami penurunan selama dua tahun berturut-turut. Pada tahun 2017, IDI D.I. Yogyakarta turun menjadi 83,61. Kemudian, pada tahun 2018, nilai IDI kembali turun menjadi 80,82.

Penurunan nilai IDI selama dua tahun berturut-turut tersebut perlu mendapat perhatian karena mengindikasikan kualitas demokrasi yang cenderung menurun dibandingkan dengan kondisi pada tahun-tahun sebelumnya. Selain itu, dalam kurun waktu 2014 – 2018, nilai IDI D.I. Yogyakarta juga berada pada titik yang paling rendah.

Gambar 4.3. Perkembangan IDI Daerah Istimewa Yogyakarta, 2009-2018

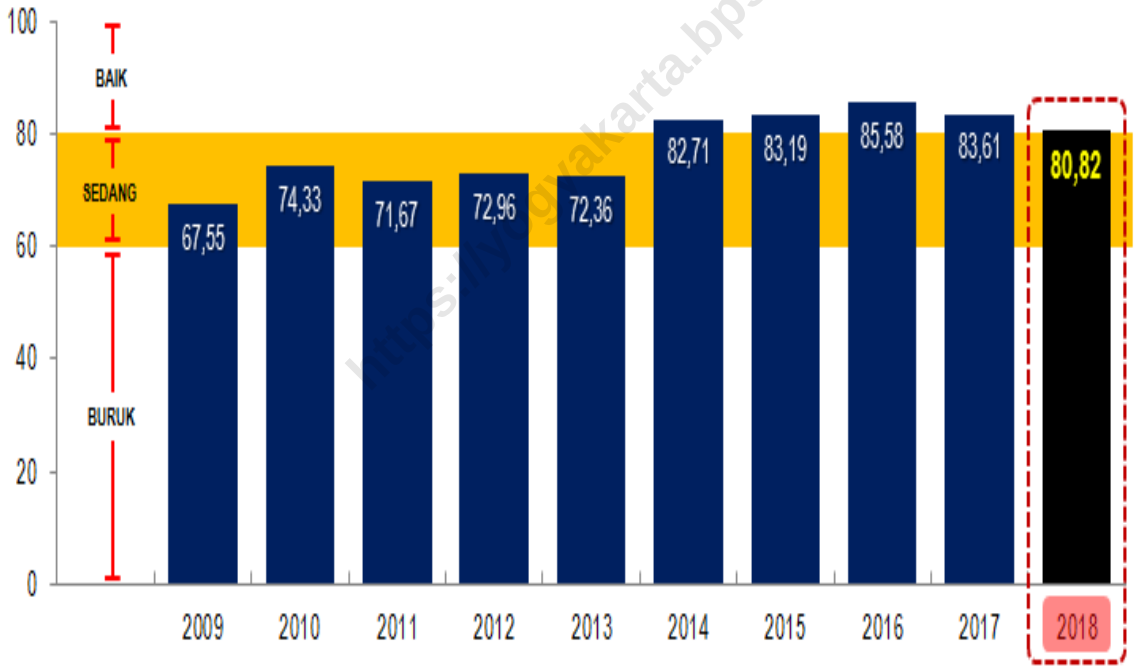

Sumber: BRS 2019

IDI merupakan indikator komposit yang diperoleh berdasarkan penghitungan tiga nilai aspek penyusunnya. Pada tahun 2018, nilai dari masing-masing aspek penyusun IDI D.I. Yogyakarta adalah : Aspek Kebebasan Sipil yang bernilai 90,60; Aspek Hak-hak Politik sebesar 75,07 dan Aspek Lembaga-lembaga Demokrasi dengan nilai sebesar 77,66.

Gambar 4.4 Perkembangan Aspek Indeks Demokrasi Indonesia D.I. Yogyakarta, 2009 - 2018

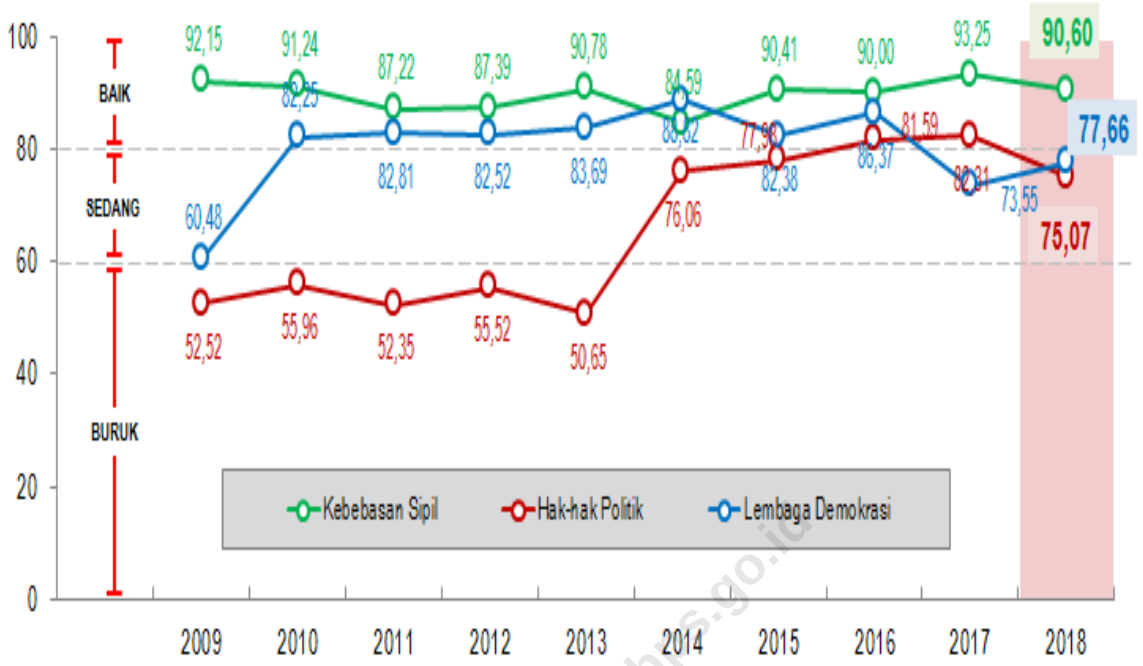

Sumber: BRS IDI 2019

Aspek Kebebasan Sipil menunjukkan fluktuasi dalam rentang yang relatif sempit. Pada tahun 2009, nilai Aspek Kebebasan Sipil tercatat sebesar 92,15. Pada tahun berikutnya, nilai aspek ini sedikit mengalami penurunan menjadi 91,24. Penurunan aspek ini masih berlanjut pada tahun 2011 menjadi 87,22. Kondisi pada 2 tahun selanjutnya menunjukkan adanya peningkatan pada aspek ini sebelum turun secara signifikan menjadi 86,25 pada tahun 2014. Nilai Aspek Kebebasan Sipil pada tahun 2014 tersebut tercatat merupakan yang terendah selama periode 2009 - 2018. Pada tahun-tahun berikutnya, nilai aspek ini mengalami perbaikan dan mencapai puncaknya pada tahun 2017, dimana nilai aspek ini tercatat sebesar 93,25 serta merupakan yang tertinggi dalam periode 2009 - 2018. Pada tahun 2018, nilai aspek ini turun menjadi 90,60. Meskipun mengalami fluktuasi dalam rentang waktu 8 tahun terakhir, Aspek Kebebasan Sipil di D.I. Yogyakarta selalu berada dalam kategori ”baik”.

Adapun Aspek Hak-hak Politik di D.I. Yogyakarta sampai dengan tahun 2013 masih tercatat berada pada kategori “buruk”. Pada tahun 2009 - 2013, nilai aspek ini berada pada kisaran 50,65 sampai dengan 55,52. Aspek Hak-hak Politik mulai mengalami peningkatan sejak tahun 2014 dimana nilainya melonjak dari 50,65 menjadi 76,06. Selain itu, pada tahun tersebut, aspek ini juga mengalami peningkatan kategori dari sebelumnya

https://yogyakarta.bps.go.id

yang termasuk dalam kategori “buruk” menjadi kategori “sedang”. Laju peningkatan indeks pada Aspek Hak-hak Politik kembali berlanjut pada tahun 2016 dimana pada tahun tersebut nilai aspek ini meningkat menjadi 81,59 dan menjadikan Aspek Hak-hak Politik berada pada kategori “baik” untuk pertama kalinya sejak tahun 2009. Namun pada tahun 2018, aspek ini kembali mengalami penurunan nilai menjadi 75,07 dan sekaligus penurunan kategori menjadi “sedang”.

Sementara itu, Aspek Lembaga Demokrasi dalam kurun waktu 2009 sampai dengan 2017 menunjukkan pola yang sedikit berbeda. Pada tahun 2009, aspek ini tercatat sebesar 60,48. Setahun berikutnya, nilai Aspek Lembaga Demokrasi meningkat secara drastis menjadi 82,25. Selanjutnya, sampai dengan tahun 2013, nilai aspek ini bergerak relatif mendatar pada kisaran 82,25 sampai dengan 83,69. Pada tahun 2014, Aspek Lembaga Demokrasi menunjukkan adanya peningkatan menjadi 88,82. Namun pada tahun 2015, nilai aspek ini kembali turun menjadi 82,38. Demikian juga halnya pada tahun 2017, dimana nilai aspek ini kembali turun menjadi 73,55 dari kondisi tahun 2016 yang nilainya 86,37. Pencapaian aspek ini pada tahun 2017 adalah yang terburuk kedua selama periode 2009 - 2017. Namun pada tahun 2018, nilai aspek ini kembali menunjukkan adanya peningkatan menjadi 77,66 meskipun masih berada pada kategori “sedang”.

Pada tahun 2018, dari ketiga aspek penyusun IDI D.I. Yogyakarta, hanya Aspek Kebebasan Sipil yang berada pada kategori “baik”. Adapun kedua aspek lainnya, yaitu Aspek Hak-hak Politik dan Lembaga-lembaga Demokrasi berada pada kategori “sedang”. Kondisi ini menunjukkan penurunan jika dibandingkan dengan pencapaian IDI D.I. Yogyakarta pada tahun sebelumnya. Bahkan jika dibandingkan dengan situasi selama empat tahun terakhir, pencapaian ketiga aspek pada tahun 2018 relatif lebih buruk.

https://yogyakarta.bps.go.id

TABEL - TABEL

https://yogyakarta.bps.go.id

https://yogyakarta.bps.go.id

Tabel 1. Luas Wilayah, Jumlah Kecamatan, Desa/kelurahan, dan Penduduk di Provinsi D.I. Yogyakarta, 2018

Kabupaten/Kota		Luas Wilayah (Km^2)	Jumlah Kecamatan	Jumlah Desa/ kelurahan	Jumlah Penduduk
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)
01	Kulon Progo	586,27	12	88	425 758
02	Bantul	506,85	17	75	1 006 692
03	Gunungkidul	1 485,36	18	144	736 210
04	Sleman	574,82	17	86	1 206 714
71	Yogyakarta	32,50	14	45	427 498
34	**D.I. Yogyakarta**	**3 185,80**	**78**	**438**	**3 802 872**

Sumber: BPS, Proyeksi Penduduk Indonesia 2010-2035

https://yogyakarta.bps.go.id

Tabel 2. Jumlah Kantor Polisi Menurut Kabupaten/Kota dan Wilayah Kerja di Provinsi D.I. Yogyakarta, 2018

Kabupaten/Kota		Polda	Polres/ Polresta	Polsek/ Polsekta	Pos Polisi
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)
01	Kulon Progo	-	1	12	1
02	Bantul	-	1	17	1
03	Gunungkidul	-	1	18	17
04	Sleman	1	1	19	2
71	Yogyakarta	-	1	14	25
	Jumlah	**1**	**5**	**80**	**46**

Sumber: Polda D.I.Yogyakarta

https://yogyakarta.bps.go.id

Tabel 3. Jumlah Polisi dan Rasio Penduduk per Polisi di Provinsi D.I. Yogyakarta, 2018

Kabupaten/Kota		Jumlah Polisi			Rasio Penduduk per Polisi
		Laki-laki	Perempuan	Total	
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)
1	Kulon Progo	1 056	89	1 145	1:372
2	Bantul	1 378	124	1 502	1:670
3	Gunungkidul	1 019	55	1 074	1:685
4	Sleman	1 673	124	1 797	1:671
5	Yogyakarta	1 445	97	1 542	1:277
6	MAPOLDA DIY	2 352	462	2 814	n.a
	D.I. Yogyakarta	**8 923**	**951**	**9 874**	**1:385**

Sumber: Polda D.I.Yogyakarta

https://yogyakarta.bps.go.id

Tabel 4. Jumlah Desa/kelurahan yang Mempunyai Pos Polisi dan Pos Kamling Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi D.I. Yogyakarta, 2018

Kabupaten/Kota		Pos Polisi	Pos Kamling
(1)		(2)	(3)
01	Kulon Progo	13	69
02	Bantul	20	69
03	Gunungkidul	29	132
04	Sleman	30	83
71	Yogyakarta	22	39
	D.I. Yogyakarta	**114**	**392**

Sumber: BPS, Podes 2018

https://yogyakarta.bps.go.id

Tabel 5. Jumlah Hansip dan Rasio Hansip per Desa/kelurahan Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi D.I. Yogyakarta, 2018

Kabupaten/Kota		Jumlah Hansip	Rasio Hansip
(1)		(2)	(3)
01	Kulon Progo	3 704	42
02	Bantul	4 836	65
03	Gunungkidul	6 039	42
04	Sleman	5 532	64
71	Yogyakarta	2 523	56
	D.I. Yogyakarta	**22 634**	**52**

Sumber: BPS, Podes 2018

https://yogyakarta.bps.go.id

Tabel 6. Jumlah Tindak Kejahatan yang Dilaporkan (*Crime Total*) Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi D.I. Yogyakarta, 2016-2018

	Kabupaten/Kota	2016	2017	2018
	(1)	(2)	(3)	(4)
1	Kulon Progo	449	426	449
2	Bantul	977	891	807
3	Gunungkidul	353	273	297
4	Sleman	2 161	1 723	1 939
5	Yogyakarta	1 802	1 196	958
6	MAPOLDA DIY	1 024	685	867
	D.I.Yogyakarta	**6 766**	**5 194**	**5 317**

Sumber: Polda D.I.Yogyakarta

https://yogyakarta.bps.go.id

Tabel 7. Jumlah Tindak Kejahatan yang Diselesaikan (*Crime Cleared*) Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi D.I. Yogyakarta, 2016-2018

	Kabupaten/Kota	2016	2017	2018
	(1)	(2)	(3)	(4)
1	Kulon Progo	206	214	242
2	Bantul	580	505	488
3	Gunungkidul	147	158	196
4	Sleman	915	878	997
5	Yogyakarta	807	680	523
6	MAPOLDA DIY	646	459	171
	D.I. Yogyakarta	**3 301**	**2 894**	**2 617**

Sumber: Polda D.I.Yogyakarta

https://yogyakarta.bps.go.id

Tabel 8. Persentase Penyelesaian Tindak Kejahatan (*Clearance Rate*) Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi D.I. Yogyakarta, 2016-2018

	Kabupaten/Kota	2016	2017	2018
	(1)	(2)	(3)	(4)
1	Kulon Progo	45,88	50,23	53,90
2	Bantul	59,37	56,68	60,47
3	Gunungkidul	41,64	57,88	65,99
4	Sleman	42,34	50,96	51,42
5	Yogyakarta	44,78	56,86	54,59
6	MAPOLDA DIY	63,09	67,01	19,72
	D.I. Yogyakarta	**48,79**	**55,72**	**49,22**

Sumber: Polda D.I.Yogyakarta

https://yogyakarta.bps.go.id

Tabel 9. Selang Waktu Terjadinya Tindak Kejahatan (*Crime Clock*) Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi D.I. Yogyakarta, 2016-2018 (detik)

Kabupaten/Kota		2016	2017	2018
(1)		(2)	(3)	(4)
1	Kulon Progo	19.30’36”	20.33’36”	19.30’36”
2	Bantul	08.58’12”	09.49’48”	10.51’18”
3	Gunungkidul	24.49’12”	32.54’00”	29.29’41”
4	Sleman	04.03’00”	05.48’00”	04.31’04”
5	Yogyakarta	04.51’36”	07.19’12”	09.08’38”
6	MAPOLDA DIY	08.33’00”	12.47’24”	10.06’13”
	D.I.Yogyakarta	01.17’24”	01.41’24”	01.38’51”

Sumber: Polda D.I..Yogyakarta

https://yogyakarta.bps.go.id

Tabel 10. Resiko Penduduk Terkena Tindak Pidana (*Crime Rate*) per 100.000 Penduduk Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi D.I. Yogyakarta, 2016-2018

Kabupaten/Kota		2016	2017	2018
(1)		(2)	(3)	(4)
01	Kulon Progo	103	96	105
02	Bantul	106	96	80
03	Gunungkidul	47	36	40
04	Sleman	200	165	161
71	Yogyakarta	438	291	224
D.I.Yogyakarta		**188**	**145**	**140**

Sumber: Polda D.I.Yogyakarta

https://yogyakarta.bps.go.id

Tabel 11. Banyaknya Desa/kelurahan yang Ada Tindak Kejahatan Menurut Jenis Kejahatan per Kabupaten/Kota di Provinsi D.I. Yogyakarta, 2018

Jenis Kejahatan		Kabupaten/Kota					D.I. Yogyakarta
		Kulon Progo	Bantul	Gunung kidul	Sleman	Yogya karta	
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Pencurian	67	59	56	75	37	294
2.	Pencurian dengan Kekerasan	-	5	-	10	2	17
3.	Penipuan/Penggelapan	19	25	19	40	18	121
4.	Penganiayaan	9	10	8	20	14	61
5.	Pembakaran	2	3	-	-	-	5
6.	Perkosaan Tindak Asusila	-	7	4	2	2	15
7.	Penyalahgunaan/Peredaran Narkoba	7	15	9	25	17	73
8.	Perjudian	18	24	15	11	6	74
9.	Pembunuhan	3	5	1	3	1	13
10.	Perdagangan Orang	-	-	-	-	-	-

Sumber : BPS, Podes 2018

https://yogyakarta.bps.go.id

Tabel 12. Banyaknya Desa/kelurahan yang Ada Perkelahian Massal Menurut Jenis Perkelahian dan Kabupaten/Kota di Provinsi D.I.Yogyakarta, 2018

Jenis Perkelahian	Kabupaten/Kota					D.I. Yogyakarta
	Kulon Progo	Bantul	Gunung kidul	Sleman	Yogya karta	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1. Antar kelompok warga	-	2	-	2	1	5
2. Warga antar Desa/kelurahan	-	1	-	-	-	1
3. Warga dengan aparat keamanan	-	-	-	-	-	-
4. Warga dengan aparat pemerintah	-	-	-	-	-	-
5. Antar pelajar/ mahasiswa	-	2	-	1	2	5
6. Antar suku	-	-	-	1	-	1
Jumlah	**-**	**5**	**-**	**4**	**3**	**12**

https://yogyakarta.bps.go.id

Sumber: BPS, Podes 2018

Tabel 13. Jumlah Laporan Tindak Kejahatan Menurut Jenis Kejahatan di Provinsi D.I. Yogyakarta, 2016-2018

No.	Jenis Kejahatan	2016	2017	2018
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Konvensional	6 192	4 759	5 267
2.	Trans Nasional	548	412	35
3.	Merugikan Kekayaan Negara	26	20	13
4.	Berimplikasi Kontijensi	-	3	2
5.	Pelanggaran HAM	-	-	-
	Jumlah	**6 766**	**5 194**	**5 317**

Sumber: Polda D.I.Yogyakarta

https://yogyakarta.bps.go.id

Tabel 14. Jumlah Tindak Kejahatan yang Menonjol di Provinsi D.I. Yogyakarta 2016-2018

No.	Jenis Tindak Pidana	2016	2017	2018
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Pembunuhan	5	1	3
2.	Penganiayaan berat (Anirat)	119	62	120
3.	Penganiayaan ringan (Anira)	200	360	516
4.	Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)	157	155	288
5.	Perkosaan	3	16	28
6.	Pencabulan	59	63	117
7.	Penculikan	14	6	9
8.	Pencurian dengan kekerasan (Curas)	171	124	242
9.	Pencurian Biasa (Termasuk Ringan)	619	553	1.076
10.	Pencurian kendaraan Bermotor (Curanmor)	563	597	1.175
11.	Pencurian Dengan Pemberatan (Curat)	767	643	1.282
12.	Pengrusakan/Penghancuran Barang	113	65	128
13.	Pembakaran Dengan Sengaja	4	2	4
14.	Narkotika dan Psikotropika	185	385	520
15.	Penipuan/Perbuatan Curang	881	757	258
16.	Penggelapan	417	401	733
17.	Korupsi	4	6	9
18.	Permainan Judi	125	5	n.a
19.	Kejahatan Terhadap Ketertiban Umum	91	2	60
20.	Lalu lintas	10 207	n.a	n.a

Sumber: Polda D.I.Yogyakarta

https://yogyakarta.bps.go.id

Tabel 15. Jumlah Korban Tindak Kejahatan Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Kelamin di Provinsi D.I. Yogyakarta, 2018

Kabupaten/Kota	Jenis Kelamin		
	L	P	L+P
(1)	(2)	(3)	(4)
1 Kulon Progo	409	40	449
2 Bantul	64	40	104
3 Gunungkidul	n.a	n.a	n.a
4 Sleman	1 127	809	1 936
5 Yogyakarta	466	415	881
6 MAPOLDA DIY	n.a	n.a	n.a
D.I. Yogyakarta	n.a	n.a	n.a

Sumber: Polda D.I. Yogyakarta

https://yogyakarta.bps.go.id

Tabel 16. Banyaknya Desa/kelurahan yang Melakukan Upaya Menjaga Keamanan Menurut Kabupaten/Kota dan Jenisnya di Provinsi D.I.Yogyakarta, 2018

Kabupaten/Kota		Jenis Upaya menjaga Keamanan				
		1	2	3	4	5
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
01	Kulon Progo	69	56	28	69	74
02	Bantul	69	60	7	71	72
03	Gunungkidul	132	113	61	111	126
04	Sleman	83	81	64	81	76
71	Yogyakarta	39	37	22	44	40
	D.I. Yogyakarta	**392**	**347**	**222**	**376**	**388**

https://yogyakarta.bps.go.id

Sumber: BPS, Podes 2018
Keterangan:

1 : Membangun Pos Kamling

2 : Membentuk regu keamanan lingkungan

3 : Menambah jumlah anggota hansip/linmas

4 : Pelaporan tamu yang menginap lebih dari 24 jam ke Aparat lingkungan

5 : Lainnya

Tabel 17. Jumlah Hakim dan dan Non Hakim menurut Jenis Kelamin di Tingkat Pengadilan di Provinsi D.I.Yogyakarta, 2018

Tingkat Pengadilan		Hakim*)		Panitera		Juru Sita		PNS/ Non PNS	
		L	P	L	P	L	P	L	P
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Pengadilan Tinggi D.I.Yogyakarta	31	2	22	14	0	0	32	21
2	Pengadilan Negeri Wates	5	3	8	9	8	3	9	1
3	Pengadilan Negeri Bantul	6	4	14	10	2	3	18	8
4	Pengadilan Negeri Wonosari	3	4	9	8	6	2	15	6
5	Pengadilan Negeri Sleman	13	8	15	13	12	5	11	5
6	Pengadilan Negeri Yogyakarta	21	16	8	19	11	11	31	8
7	Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta	15	3	9	1	0	0	25	15
8	Pengadilan Agama Yogyakarta	10	4	6	5	4	5	13	8
9	Pengadilan Agama Sleman	11	4	6	7	4	6	16	3
10	Pengadilan Agama Bantul	2	4	3	9	6	4	11	8
11	Pengadilan Agama Wonosari	7	1	8	5	4	4	10	4
12	Pengadilan Agama Wates	3	3	6	5	6	2	16	2
13	Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta	1	11	0	1	0	0	18	16
14	Mahkamah Militer II-11 Yogyakarta	3	2	2	0	0	0	26	4
Jumlah		**131**	**69**	**116**	**106**	**63**	**45**	**251**	**109**

Sumber : Pengadilan Tinggi D.I.Yogyakarta, Pengadilan Tinggi Agama D.I.Yogyakarta, Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta dan Mahkamah Militer II-11 Yogyakarta .

https://yogyakarta.bps.go.id

Tabel 18. Rekapitulasi Narapidana Berdasarkan Jenis Tindak Pidana dan Pidana, 2018

No	Jenis Kejahatan	Pasal KUHP/UU	Hukuman Mati	Seumur Hidup
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Thd Ketertiban	154-181	0	0
2.	Pembakaran	187-188	0	0
3.	Mata Uang	244-251	0	0
4.	Memalsukan Materai/Surat	253-275	0	0
5.	Kesusilaan	281-297	0	0
6.	Perjudian	303	0	0
7.	Penculikan	324-336	0	0
8.	Pembunuhan	338-350	3	1
9.	Penganiayaan	351-356	0	0
10.	Pencurian	362-364	0	0
11.	Perampokan	365	0	0
12.	Pemerasan/Mengancam	368-369	0	0
13.	Penggelapan	372-375	0	0
14.	Penipuan	378	0	0
15.	Penadahan	480-481	0	0
16.	Narkotika	UU No. 35 Th. 2009	1	0
17.	Korupsi	UU No. 20 Th. 2001	0	0
18.	Pencucian Uang	UU No. 25 Th. 2003	0	0
19.	Laka Lantas	UU No. 22 Th. 2009	0	0
20.	*Traficking*	UU No. 21 Th. 2007	0	0
21.	*Ilegal Loging*	UU No. 41 Th. 1999	0	0
22.	Perlindungan Anak	UU No. 23 Th. 2002	0	0
23.	Keimigrasian	UU No. 9 Th. 1992	0	0
24.	KDRT	UU No. 23 Th. 2004	0	0
25.	Darurat	UU No 12 Th 1951	0	0
26.	Kesehatan	UU No 36 Th 2009	0	0
27.	Terorisme	UU No 15 Th 2003	0	0
	Jumlah		**4**	**1**

https://yogyakarta.bps.go.id

Tabel 18

No	Jenis Kejahatan	Pasal KUHP/UU	Pidana ≥ 3 Tahun	1 Tahun > Pidana < 3 tahun
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)
1.	Thd Ketertiban	154-181	0	5
2.	Pembakaran	187-188	0	1
3.	Mata Uang	244-251	0	0
4.	Memalsukan Materai/Surat	253-275	1	2
5.	Kesusilaan	281-297	3	0
6.	Perjudian	303	0	0
7.	Penculikan	324-336	0	1
8.	Pembunuhan	338-350	10	2
9.	Penganiayaan	351-356	14	12
10.	Pencurian	362-364	15	144
11.	Perampokan	365	0	0
12.	Pemerasan/Mengancam	368-369	0	3
13.	Penggelapan	372-375	1	51
14.	Penipuan	378	3	48
15.	Penadahan	480-481	0	4
16.	Narkotika	UU No. 35 Th. 2009	248	62
17.	Korupsi	UU No. 20 Th. 2001	18	11
18.	Pencucian Uang	UU No. 25 Th. 2003	5	1
19.	Laka Lantas	UU No. 22 Th. 2009	7	0
20.	*Trafficking*	UU No. 21 Th. 2007	1	0
21.	*Ilegal Loging*	UU No. 41 Th. 1999	0	0
22.	Perlindungan Anak	UU No. 23 Th. 2002	85	9
23.	Keimigrasian	UU No. 9 Th. 1992	0	0
24.	KDRT	UU No. 23 Th. 2004	3	0
25.	Darurat	UU No 12 Th 1951	0	5
26.	Kesehatan	UU No 36 Th 2009	0	25
27.	Terorisme	UU No 15 Th 2003	0	0
Jumlah			**414**	**386**

Sumber: Kanwil Hukum dan HAM Provinsi D.I.Yogyakarta

https://yogyakarta.bps.go.id

Tabel 19. Jumlah Narapidana dan Anak Pidana Berdasarkan Jenis Tindak Pidana, 2018

No	Jenis Kejahatan	Pasal KUHP/UU	Dewasa		Anak		Jumlah
			L	P	L	P	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Thd Ketertiban	154-181	5	0	0	0	5
2.	Pembakaran	187-188	1	0	0	0	1
3.	Mata Uang	244-251	1	0	0	0	1
4.	Memalsukan Materai/Surat	253-275	2	4	0	0	6
5.	Kesusilaan	281-297	6	0	1	0	7
6.	Perjudian	303	18	0	0	0	18
7.	Penculikan	324-336	1	0	0	0	1
8.	Pembunuhan	338-350	16	0	0	0	16
9.	Penganiayaan	351-356	48	0	3	0	51
10.	Pencurian	362-364	206	29	2	0	237
11.	Perampokan	365	0	0	0	0	0
12.	Pemerasan/Mengancam	368-369	5	0	0	0	5
13.	Penggelapan	372-375	59	8	0	0	67
14.	Penipuan	378	50	13	0	0	63
15.	Penadahan	480-481	9	0	0	0	9
16.	Narkotika	UU No. 35 Th. 2009	356	33	0	0	389
17.	Korupsi	UU No. 20 Th. 2001	22	8	0	0	30
18.	Pencucian Uang	UU No. 25 Th. 2003	4	2	0	0	6
19.	Laka Lantas	UU No. 22 Th. 2009	10	0	0	7	17
20.	*Traficking*	UU No. 21 Th. 2007	1	0	0	0	1
21.	*Ilegal Loging*	UU No. 41 Th. 1999	0	0	0	0	0
22.	Perlindungan Anak	UU No. 23 Th. 2002	98	6	1		105
23.	Keimigrasian	UU No. 9 Th. 1992	0	0	0	0	0
24.	KDRT	UU No. 23 Th. 2004	7	2	0	0	9
25.	Darurat	UU No 12 Th 1951	5	0	0	0	5
26.	Kesehatan	UU No 36 Th 2009	38	4	0	0	42
27.	Terorisme	UU No 15 Th 2003	0	0	0	0	0
	Jumlah		**968**	**109**	**7**	**7**	**1 091**

Sumber: Kanwil Hukum dan HAM Provinsi D.I.Yogyakarta

https://yogyakarta.bps.go.id

Tabel 20. Jumlah PNS Menurut Eselon dan Jenis Kelamin, 2018

No	Kabupaten/Kota	Eselon II		Eselon III		Eselon IV		Jumlah Seluruh PNS	
		L	P	L	P	L	P	L	P
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
01	Kulon Progo	27	3	108	36	256	179	2 858	3 345
02	Bantul	24	4	116	43	275	235	3 313	4 696
03	Gunungkidul	24	4	127	34	335	162	4 484	3 926
04	Sleman	26	8	114	61	330	250	3 442	5 391
71	Yogyakarta	17	3	96	54	316	343	2 285	2 944
34	D.I. Yogyakarta	31	8	120	72	331	267	5 942	5 433
	Jumlah	**149**	**30**	**681**	**300**	**1 843**	**1 436**	**22 324**	**25 735**

Sumber: Badan Kepegawaian Daerah

https://yogyakarta.bps.go.id

Tabel 21. Jumlah Anggota DPRD Provinsi Menurut Asal Partai Politik dan Jenis Kelamin di Provinsi D.I.Yogyakarta, 2018

No.	Partai Politik	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P)	13	1	14
2.	Partai Golongan Karya (Golkar)	6	2	8
3.	Partai Amanat Nasional (PAN)	6	2	8
4.	Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra)	7	0	7
5.	Partai Keadilan Sejahtera (PKS)	6	0	6
6.	Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)	4	1	5
7.	Partai Nasional Demokrat (Nasdem)	3	0	3
8.	Partai Demokrat	0	2	2
9.	Partai Persatuan Pembangunan (PPP)	2	0	2
	Jumlah	**47**	**8**	**55**

Sumber: KPU D.I. Yogyakarta
Keterangan: -

https://yogyakarta.bps.go.id

Tabel 22. Jumlah Anggota DPRD Menurut Partai Politik dan Kabupaten/Kota di Provinsi D.I.Yogyakarta, 2018

No.	Partai Politik	Kabupaten/Kota				
		Kulon Progo	Bantul	Gunung kidul	Sleman	Yogya karta
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
01.	Partai Nasional Demokrat (Nasdem)	1	2	2	5	1
02.	Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)	5	4	3	5	0
03.	Partai Keadilan Sejahtera (PKS)	5	4	5	6	4
04.	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P)	8	12	11	12	15
05.	Partai Golongan Karya (Golkar)	5	5	6	4	5
06.	Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra)	5	6	6	7	5
07.	Partai Demokrat	2	1	4	1	1
08.	Partai Amanat Nasional (PAN)	7	6	7	6	5
09.	Partai Persatuan Pembangunan (PPP)	1	4	0	4	4
10.	Partai Bulan Bintang (PBB)	0	1	0	0	0
11.	Partai Hati Nurani (Hanura)	1	0	1	0	0
Jumlah		**40**	**45**	**45**	**50**	**40**

Sumber : KPU Kabupaten/Kota/D.I. Yogyakarta
Keterangan: -

https://yogyakarta.bps.go.id

Tabel 23. Jumlah Anggota DPRD Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Provinsi D.I. Yogyakarta, 2018

Kabupaten/Kota		Kelompok Umur								Jumlah		
		21-35		36-49		50-59		60+		L	P	Total
		L	P	L	P	L	P	L	P			
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	Kulon Progo	2	2	20	4	10	1	1	0	33	7	40
2	Bantul	5	2	27	0	8	1	2	0	42	3	45
3	Gunungkidul	5	2	24	5	5	0	4	0	38	7	45
4	Sleman	5	4	25	7	6	1	1	1	37	13	50
5	Yogyakarta	3	2	16	7	8	1	3	0	30	10	40
DPRD Provinsi		0	0	23	4	19	3	5	0	48	7	55

Sumber: KPU Kabupaten/Kota/D.I. Yogyakarta

https://yogyakarta.bps.go.id

Tabel 24. Jumlah Anggota DPRD Menurut Tingkat Pendidikan dan Jenis Kelamin di Provinsi D.I. Yogyakarta, 2018

Kabupaten/Kota		Pendidikan Terakhir								Jumlah		
		≤ SLTA		D1-D3		D4/S1		S2-S3		L	P	Total
		L	P	L	P	L	P	L	P			
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	Kulon Progo	14	1	0	0	17	6	2	0	33	7	40
2	Bantul	18	0	3	1	19	2	2	0	42	3	45
3	Gunungkidul	11	3	1	0	22	2	4	2	38	7	45
4	Sleman	12	2	0	1	23	8	2	2	37	13	50
5	Yogyakarta	8	1	2	0	19	6	1	3	30	10	40
DPRD Provinsi		4	1	0	0	35	5	9	1	48	7	55

Sumber: KPU Kabupaten/Kota/D.I. Yogyakarta

Tabel 25. Jumlah Penduduk yang Terdaftar dalam Pemilu Legislatif 2014 dan Hasil Perolehan Suara untuk DPRD Provinsi di Provinsi D.I. Yogyakarta

DPRD Prov

Kabupaten/Kota		Jumlah Pemilih	Perolehan Suara		
			Suara Sah	Suara Tidak Sah	Golput
(1)		*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*
01	Kulonprogo	337 038	250 213	21 647	65 178
02	Bantul	729 469	546 853	45 669	136 947
03	Gunungkidul	599 012	439 864	30 591	128 557
04	Sleman	794 582	602 824	44 291	147 467
71	Yogyakarta	311 863	218 623	18 028	75 212
34	**D.I.Yogyakarta**	**2 771 964**	**2 058 377**	**160 226**	**553 361**

Sumber : KPU Kabupaten/Kota/D.I. Yogyakarta

https://yogyakarta.bps.go.id

Tabel 26. Jumlah Penduduk yang Terdaftar dalam Pemilu Legislatif 2014 dan Hasil Perolehan Suara untuk DPRD Kabupaten/Kota di Provinsi D.I. Yogyakarta

Kabupaten/Kota		Jumlah Pemilih	Perolehan Suara		
			Suara Sah	Suara Tidak Sah	Golput
(1)		(3)	(4)	(5)	(6)
01	Kulonprogo	337 038	261 747	10 113	65 178
02	Bantul	729 675	560 727	31 574	137 374
03	Gunungkidul	599 071	453 161	17 262	128 648
04	Sleman	794 978	614 796	32 319	147 863
71	Yogyakarta	311 692	222 637	14 014	75 212
34	**D.I.Yogyakarta**	**2 772 625**	**2 113 068**	**105 282**	**554 275**

Sumber : KPU Kabupaten/Kota/D.I. Yogyakarta

Tabel 27. Jumlah Calon Anggota Legislatif Pemilu 2014 di Provinsi D.I. Yogyakarta

Kabupaten/Kota		DPR RI		DPRD Prov.		DPRD Kab/Kota	
		L	P	L	P	L	P
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
01	Kulonprogo			44	30	238	165
02	Bantul			84	56	263	203
03	Gunungkidul	56	40	63	44	258	189
04	Sleman			112	73	296	197
71	Yogyakarta			43	31	217	145
D.I. Yogyakarta		**56**	**40**	**346**	**234**	**1 272**	**899**

Sumber: KPU Kabupaten/Kota/D.I. Yogyakarta

https://yogyakarta.bps.go.id

Tabel 28. Jumlah Penduduk yang Terdaftar dalam Pemilu Presiden 2014 dan Hasil Perolehan Suara di Provinsi D.I. Yogyakarta

Kabupaten/Kota		Jumlah Pemilih	Perolehan Suara		
			Suara Sah	Suara Tidak Sah	Golput
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)
01	Kulonprogo	335 897	264 026	4 127	69 888
02	Bantul	732 124	584 918	10 352	136 854
03	Gunungkidul	601 556	456 911	5 623	139 022
04	Sleman	818 960	659 395	9 883	149 682
71	Yogyakarta	321 425	246 341	3 588	71 494
D.I. Yogyakarta		**2 812 144**	**2 211 591**	**33 573**	**566 980**

Sumber: KPU Kabupaten/Kota/D.I. Yogyakarta

Tabel 29. Alokasi Anggaran Sektor Pendidikan dan Sektor Kesehatan di Provinsi D.I. Yogyakarta, 2014-2018 (dalam rupiah)

No.	Tahun	Sektor Pendidikan		Sektor Kesehatan	
		Nominal	Persentase Thd Total Anggaran	Nominal	Persentase Thd Total Anggaran
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	2014	872 166 891 980	23,77	246 072 302 906	8,24
2.	2015	877 264 635 392	23,08	374 800 523 039	11,55
3.	2016	1 092 817 284 144	27,50	387 122 289 647	11,42
4.	2017	1 910 798 949 981	36,83	416 329 525 377	10,62
5.	2018*	1 327 372 081 501	15,30	178 488 693 986	3,18

Sumber: DPPKA Provinsi D.I. Yogyakarta
*) hasil penghitungan koding dokumen IDI 2018

Tabel 30. Jumlah Produk Hukum yang Dihasilkan DPRD Provinsi D.I. Yogyakarta, 2014-2018

Tahun	Peraturan Daerah	Keputusan DPRD	Peraturan DPRD	Keputusan Pimpinan Dewan	Kesepakatan Bersama	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2014	10	66	3	104	10	193
2015	16	88	2	111	21	238
2016	16	78	1	130	21	246
2017	9	91	2	60	11	173
2018	11	90	1	129	0	231

Sumber: JDIH DPRD D.I. Yogyakarta

https://jogyakarta.bps.go.id

Tabel 31. Waktu Pelaksanaan dan Banyaknya Pasangan Calon Pada Pemilihan Bupati/Walikota dan Wakil Bupati/Walikota Terakhir di Provinsi D.I. Yogyakarta

No	Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Pemilihan	Jumlah Pasangan Calon
(1)	(2)	(3)	(4)
01	Kulonprogo	15 Februari 2017	2
02	Bantul	9 Desember 2015	2
03	Gunungkidul	9 Desember 2015	4
04	Sleman	9 Desember 2015	2
71	Kota Yogyakarta	15 Februari 2017	2

Sumber: KPU Kabupaten/Kota di D.I. Yogyakarta

https://yogyakarta.bps.go.id

Tabel 32. Jumlah Pemilih Terdaftar dan Menggunakan Hak Pilih Pada Pemilihan Kepala Daerah Tingkat Kabupaten/Kota di Provinsi D.I. Yogyakarta

No	Kabupaten/Kota	Terdaftar di DPT	Suara Sah	Persentase Suara Sah terhadap DPT
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
01	Kulonprogo	332 211	257 517	77,52
02	Bantul	695 855	495 089	71,15
03	Gunungkidul	619 825	424 810	68,54
04	Sleman	779 588	524 900	67,33
71	Kota Yogyakarta	298 989	199.475	66,72

Sumber: KPU Kabupaten/Kota di D.I. Yogyakarta

Tabel 33. Perolehan Suara dan Partai Pendukung Kepala Daerah Tingkat Kabupaten/Kota di Provinsi D.I. Yogyakarta

Kode	Kabupaten/Kota	Perolehan Suara		Partai Pendukung
		Jumlah	%	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
01	Kulonprogo	220 643	85,68	PDI-P, PAN, Golkar, PKS, Nasdem, dan Hanura
02	Bantul	261 412	52,80	Gerindra dan PKB
03	Gunungkidul	167 915	39,53	PAN, Golkar, Nasdem, Hanura
04	Sleman	297 267	56,63	PAN, Nasdem, Golkar, Demokrat, PKB
71	Kota Yogyakarta	100 332	50,30	Golkar, PAN, PKS, Demokrat, dan Gerindra

Sumber: KPU Kabupaten/Kota di D I Yogyakarta

https://jogyakarta.bps.go.id

Tabel 34. Kepala Daerah Tingkat Kabupaten/Kota Hasil Pilkada Terakhir Menurut Jenis Kelamin, Pendidikan, Usia dan Jabatan Sebelumnya di D.I. Yogyakarta

Kode	Kabupaten/Kota	Jenis Kelamin	Pendidikan Terakhir	Usia Saat Terpilih	Jabatan/Pekerjaan Sebelumnya
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*
01	Kulonprogo	Laki-laki	S-1/Spesialis II Kedokteran	52	Bupati
02	Bantul	Laki-laki	S-1	58	Purnawirawan Polri
03	Gunungkidul	Perempuan	S-1	66	Bupati
04	Sleman	Laki-laki	S-2	55	Wakil Bupati
71	Kota Yogyakarta	Laki-laki	S-1	53	Bupati

Sumber: KPU Kabupaten/Kota di D I Yogyakarta

Tabel 35. Perkembangan Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) D.I. Yogyakarta, 2014-2018

Variabel/Aspek		2014	2015	2016	2017	2018
(1)		*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*
1.	**Kebebasan Sipil**	**86,25**	**90,41**	**90,00**	**93,25**	**90,60**
1.1	Kebebasan Berkumpul dan Berserikat	46,25	100,00	95,31	100,00	100,00
1.2	Kebebasan Berpendapat	81,65	83,30	83,30	61,09	83,33
1.3	Kebebasan Berkeyakinan	95,13	86,28	94,24	94,63	86,56
1.4	Kebebasan dari Diskriminasi	80,40	99,90	80,40	100,00	100,00
2.	**Hak-Hak Politik**	**70,07**	**77,98**	**81,59**	**82,31**	**75,07**
2.1	Hak Memilih dan Dipilih	77,62	77,70	77,62	78,20	78,78
2.2	Partisipasi Politik dalam Pengambilan Keputusan dan Pengawasan	74,53	78,26	85,57	86,41	74,36
3.	**Lembaga-lembaga Demokrasi**	**88,82**	**82,38**	**86,37**	**73,55**	**77,66**
3.1	Pemilu yang Bebas dan Adil	97,47	97,47	97,47	97,47	97,47
3.2	Peran DPRD	50,96	87,33	63,00	79,33	50,06
3.3	Peran Partai Politik	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3.4	Peran Birokrasi Pemerintah Daerah	100,00	97,14	73,77	40,60	46,62
3.5	Peran Peradilan yang Independen	95,00	62,50	100,00	62,50	100,00
Indeks Demokrasi Indonesia		**82,71**	**83,19**	**85,58**	**83,61**	**80,82**

Sumber : BRS IDI 2019, BPS DIY.

https://yogyakarta.bps.go.id

Tabel 36. Perkembangan Skor Indikator IDI 2017 dan 2018

Nomor	Indikator	2017	2018
	Kebebasan Sipil		
1	Ancaman/penggunaan kekerasan oleh aparat pemerintah yang menghambat kebebasan berkumpul dan berserikat	100,00	100,00
2	Ancaman/penggunaan kekerasan oleh masyarakat yang menghambat kebebasan berkumpul dan berserikat	100,00	100,00
3	Ancaman /penggunaan kekerasan oleh aparat pemerintah yang menghambat menghambat kebebasan berpendapat	70,83	87,50
4	Ancaman/penggunaan kekerasan oleh masyarakat yang menghambat kebebasan berpendapat	12,50	62,50
5	Aturan tertulis yang membatasi kebebasan masyarakat dalam menjalankan ajaran agamanya	100,00	95,65
6	Tindakan atau pernyataan pejabat yang membatasi kebebasan menjalankan ibadah agama	100,00	87,50
7	Ancaman/penggunaan kekerasan dari satu kelompok terhadap kelompok masyarakat lain terkait ajaran agama	70,00	50,00
8	Aturan tertulis yang diskriminatif dalam hal gender, etnis, kelompok	100,00	100,00
9	Tindakan/pernyataan pejabat yang diskriminatif dalam hal gender, etnis, kelompok	100,00	100,00
10	Ancaman/penggunaan kekerasan oleh masyarakat karena alasan gender, etnis, kelompok	100,00	100,00
	Hak-Hak Politik		
11	Hak memilih atau dipilih terhambat	100,00	100,00
12	Kekurangan fasilitas sehingga kelompok penyandang cacat tidak dapat menggunakan hak pilih	60,00	60,00
13	Kualitas Daftar Pemilih Tetap (DPT)	79,64	79,64
14	Voters turnout	80,02	80,02
15	Persentase perempuan terpilih terhadap total anggota DPRD Propinsi	42,42	48,48
16	Demonstrasi/mogok yang bersifat kekerasan	72,83	73,91
17	Pengaduan masyarakat mengenai penyelenggaraan pemerintahan	100,00	68,81
	Lembaga Demokrasi		
18	Keberpihakan KPUD dalam penyelenggaraan pemilu	100,00	100,00
19	Kecurangan dalam penghitungan suara	94,94	94,94
20	Alokasi anggaran pendidikan dan kesehatan	92,32	54,17
21	Perda yang merupakan inisiatif DPRD	88,89	66,67
22	Rekomendasi DPRD kepada Eksekutif	25,00	21,43
23	Kegiatan kaderisasi yang dilakukan partai peserta pemilu	100,00	100,00
24	Persentase perempuan pengurus partai politik	100,00	100,00
25	Kebijakan pejabat pemerintah daerah yang dinyatakan bersalah oleh keputusan PTUN	78,95	92,11
26	Upaya penyediaan informasi APBD oleh pemerintah daerah	8,33	8,33
27	Keputusan hakim yang kontroversial	100,00	100,00
28	Penghentian penyidikan yang kontroversial oleh jaksa atau polisi	25,00	100,00

Sumber: BRS IDI 2019, BPS DIY.

https://yogyakarta.bps.go.id

https://yogyakarta.bps.go.id

DATA

MENCERDASKAN BANGSA

https://yogyakarta.bps.go.id

BADAN PUSAT STATISTIK
PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
Jl. Lingkar Selatan Tamantirto Kasihan Bantul Yogyakarta 55183
Telp.(0274) 4342234 (Hunting) Fax. 4342230
Email : bps3400@mailhost.bps.go.id Website:http://yogyakarta.bps.go.id

ISSN 2460-3139